



# LAPORAN KINERJA Instansi Pemerintah



[www.halmaherautarakab.go.id](http://www.halmaherautarakab.go.id)

**LKjIP  
2020**



# KATA PENGANTAR



Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan hikmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dapat diselesaikan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Laporan Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Secara substantif merupakan sarana pelaporan kinerja dalam rangka mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Selain itu, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016–2021, hal ini sebagai perwujudan dan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel serta menciptakan ***Good Governance*** dan ***Clean Government***.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparatur pemerintahan daerah, baik dalam perumusan kebijakan, implementasi maupun pengawasannya.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 ini, bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan tahun 2020 dan dijadikan sebagai bahan masukan untuk penyempurnaan dan meningkatkan kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 31 Maret 2021

PIH. BUPATI HALMAHERA UTARA,



YUDHIAHART NOYA, S.SI., MH



# IKHTISAR EKSEKUTIF



Dalam rangka penyelenggaraan Tata Pemerintahan Daerah yang baik dan bersih (*clean and good governance*) pada pengelolaan administrasi publik dan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, merupakan hal yang harus dilakukan di era reformasi. Reformasi Birokrasi merupakan perwujudan responsibilitas dan sensitifitas pemerintah terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita kehidupan berbangsa, bernegara dan bertanah air. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara berupaya menyelenggarakan pemerintahan dengan berprinsip pada pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*) sesuai dengan kewenangannya dan manajemen pemerintahan yang diimplementasikan adalah akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja memuat visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang jelas atas rumusan perencanaan strategis organisasi, sehingga gambaran hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran tersebut dapat terukur, dapat diuji dan dapat diandalkan, juga sebagai pertanggungjawaban pencapaian kinerja dari pelaksanaan RPJMD 2016-2021 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2020 ini pada hakekatnya merupakan upaya untuk memberikan informasi dan penjelasan mengenai akuntabilitas kinerja yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara sepanjang tahun 2020, dan akhir periode RPJMD 2016-2021.

Pada awal tahun 2020 dilaksanakan pembahasan perubahan RPJMD Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan Berdasarkan isu-isu sentral dan strategis di Kabupaten Halmahera Utara, ditetapkan Visi dan Misi Kabupaten Halmahera Utara sebagai cita-cita dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara.

Dengan berpedomanan pada Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021, Visi Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 adalah "***Terwujudnya kesejahteraan masyarakat Halmahera Utara melalui Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan profesional dilandasi kebersamaan yang berkeadilan***". Dalam upaya perwujudan visi tersebut ditetapkan 4 (empat) misi yang kemudian menjadi landasan penetapan 7 (tujuh) tujuan strategis Kabupaten Halmahera Utara dan 12 (dua belas) sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Halmahera Utara, dengan menggunakan instrumen pengukuran 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja sasaran.

Capaian sasaran dalam rangka mencapai Visi, Misi dan Tujuan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah sebagai berikut:

- Misi I terdapat 1 tujuan, 3 sasaran dan 6 indikator kinerja;



Capaian indikator sasaran, sebanyak **3** (dua) sasaran dengan kategori **Baik Sekali** dengan persentase rata-rata **131,49%**;

- Misi II terdapat 3 tujuan, 5 sasaran dan 17 indikator kinerja;  
Capaian indikator sasaran, sebanyak **1** (satu) sasaran kategori **Baik Sekali**, **3** (tiga) sasaran **Baik** dan **1** (satu) sasaran **Cukup** atau persentase rata-rata **90,92%**;
- Misi III terdapat 1 tujuan, 1 sasaran dan 5 indikator kinerja;  
Capaian indikator sasaran, sebanyak **1** (satu) sasaran kategori **Cukup** atau persentase **72,07%**;
- Misi IV terdapat 3 tujuan, 3 sasaran dan 10 indikator kinerja;  
Capaian indikator sasaran, sebanyak **3** (tiga) sasaran kategori **Baik** atau persentase rata-rata **84,87%**.

Dengan hasil capaian kinerja tersebut diharapkan dapat menjadi informasi yang berpengaruh positif pada peningkatan motivasi seluruh aparatur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara, untuk senantiasa memberikan kinerja terbaiknya dengan melengkapi setiap kekurangan dan memperbaiki setiap kesalahan guna peningkatan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Halmahera Utara.



# DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

1.2 GAMBARAN UMUM

1.2.1 KEADAAN GEOGRAFI DAN IKLIM

1.2.2 ARTI LAMBANG KABUPATEN HALMAHERA UTARA

1.2.3 PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRASI

1.2.4 DEMOGRAFI

1.2.5 PERTUMBUHAN EKONOMI

1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1.4 SUMBER DAYA APARATUR

1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

2.1.1 VISI & MISI

2.1.2 PROGRAM

2.2 PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2020

3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN



# DAFTAR TABEL



- Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara
- Gambar 2. Logo Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 1. Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 2. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk tahun 2020
- Tabel 3. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
- Tabel 4. Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 5. Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan
- Tabel 6. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama
- Tabel 7. Sasaran Strategis, Program dan Anggaran
- Tabel 8. Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020
- Tabel 9. Pencapaian Indikator Sasaran
- Tabel 10. Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan
- Tabel 11. Rekapitulasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020
- Tabel 12. Sasaran Strategis 1
- Tabel 13. Sasaran Strategis 2
- Tabel 14. Angka Kriminalitas
- Tabel 15. Sasaran Strategis 3
- Tabel 16. Sasaran Strategis 4
- Tabel 17. Sasaran Strategis 5
- Tabel 18. Sasaran Strategis 6
- Tabel 19. Program dan Kegiatan Sasaran 6
- Tabel 20. Sasaran Strategis 7
- Tabel 21. Data Jembatan Menurut Kondisi Jembatan di Kabupaten Halmahera Utara
- Tabel 22. Program dan Kegiatan Sasaran 7
- Tabel 23. Sasaran Strategis 8
- Tabel 24. Sasaran Strategis 9
- Tabel 25. Sasaran Strategis 10
- Tabel 26. Sasaran Strategis 11
- Tabel 27. Ratio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Tahun 2020
- Tabel 28. Sasaran Strategis 12
- Tabel 29. Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2020
- Tabel 30. Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020
- Grafik 1. Capaian Kinerja Sasaran 2
- Grafik 2. Capaian Kinerja Sasaran 4





# BAB I PENDAHULUAN



## 1.1 LATAR BELAKANG

Untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi: Asas Kepastian Hukum, Asas tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas serta Asas Akuntabilitas. "Asas Akuntabilitas" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Angka 7 merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian setiap kegiatan harus dilaporkan atau disediakan informasi tentang kinerja pemerintah, yang dilaksanakan dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari masyarakat.

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Kepala Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahunan untuk disampaikan ke Gubernur, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi dan Kepala BAPPENAS serta Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun secara periodik pada setiap akhir tahun anggaran sebagai wujud tanggung jawab dan kewajiban suatu instansi pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam rangka mewujudkan terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang tepat, jelas, terukur dan legitimate.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan akuntabilitas instansi pemerintah dalam menjalankan Kinerja Pemerintah selama satu tahun. Penyusunan Laporan Kinerja didasarkan pada perencanaan kinerja yang disusun pada tahun sebelumnya yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Pemerintah Daerah (RKPD). Beberapa kegiatan telah menghasilkan *outcome* dan beberapa lainnya masih pada taraf *output*. Namun demikian, hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata yang tidak saja



kepada pencapaian Sasaran, Tujuan, Visi dan Misi tetapi juga berbagai program dan kebijakan pemerintah secara umum.

## 1.2

## GAMBARAN UMUM

### 1.2.1 Keadaan Geografi dan Iklim

Kabupaten Halmahera Utara terletak di bagian Utara Provinsi Maluku Utara, secara astronomis terletak antara 1°57' Lintang Utara dan 2°00' Lintang Utara dan antara 128°17' Bujur Timur dan 128°18' Bujur Timur, Luas keseluruhan wilayah Kabupaten Halmahera Utara adalah 22.507,32 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari 19,375,02 km<sup>2</sup> (86,10%) wilayah laut dan 3.132,30 km<sup>2</sup> (13,90%) wilayah darat.

Kondisi tanah di Kabupaten Halmahera Utara berbentuk eksisting lereng, dapat dilihat bahwa wilayah daratan Halmahera Utara didominasi oleh lahan dengan kemiringan lereng 0-8%. Sebagian wilayah di Loloda Utara dan Galela Utara memiliki lahan dengan kemiringan 26-40% dibandingkan dengan wilayah lainnya di daratan Halmahera Utara. Daerah dengan kemiringan lereng curam yaitu >40% tersebar di sebagian wilayah Galela, Tobelo Utara, Tobelo dan Tobelo Tengah. Sedangkan ketinggian lahan di Kabupaten Halmahera Utara untuk dataran rendah berkisar antara 0-35 meter diatas permukaan laut dan wilayah perbukitan serta pegunungan berkisar antara 35-1.275 meter diatas permukaan laut.

Kabupaten Halmahera Utara beriklim tropis dengan suhu rata-rata maksimal 26,7° C dan minimal 25,7° C, kelembaban rata-rata maksimal 91% dan minimal 87% dan kecepatan angin rata-rata maksimal 3 knot dan minimal 1 knot, serta penyinaran rata-rata matahari maksimal 56 dan minimal 36.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Halmahera Utara memiliki batas-batas sebagai berikut:

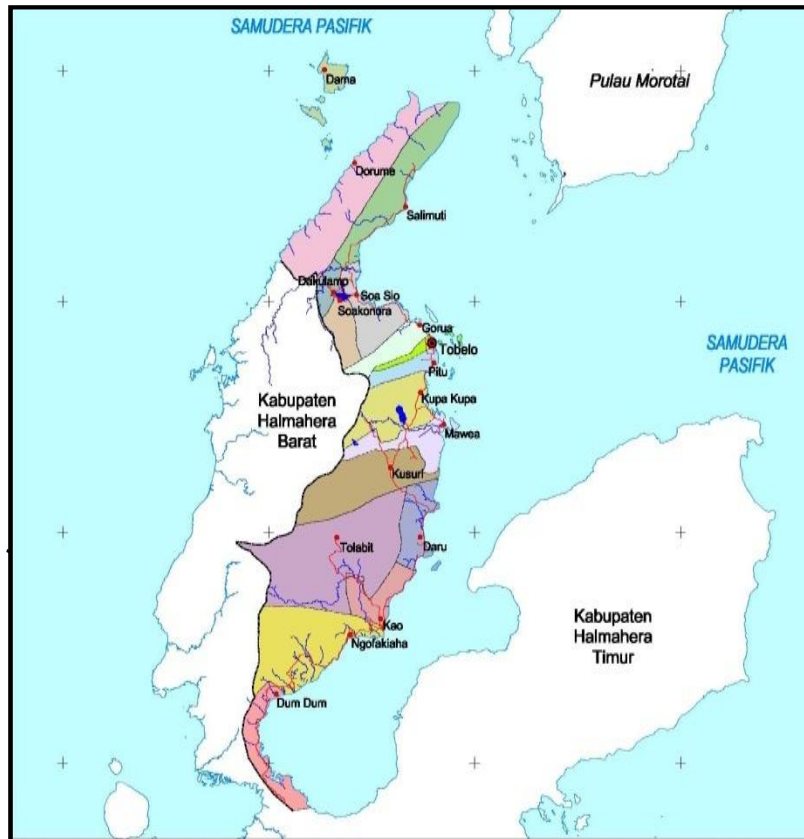
- Utara : Selat Morotai dan Samudera Pasifik
- Selatan : Kecamatan Jailolo Selatan, Kabupaten Halmahera Barat
- Barat : Kecamatan Loloda, Sahu, Ibu dan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat
- Timur : Kecamatan Wasile, Kabupaten Halmahera Timur dan Laut Halmahera

Kecamatan Tobelo yang menjadi pusat pemerintahan di Kabupaten Halmahera Utara, dengan jumlah penduduk terbesar diantara kecamatan lain, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung perekonomian seperti pelabuhan, bank, pasar maupun aktivitas primer lainnya yang tersedia di wilayah ini, tidak heran jika Kecamatan Tobelo juga menjadi pusat aktifitas bisnis di Kabupaten Halmahera Utara dan juga di Provinsi Maluku Utara.

Kecamatan Loloda Kepulauan hanya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi laut dari Tobelo (Ibu Kota Kabupaten Halmahera Utara), sedangkan untuk Kecamatan Loloda Utara dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat dan laut. Dan untuk 15 kecamatan lainnya dapat dijangkau dengan menggunakan transportasi darat. Peta wilayah Kabupaten Halmahera Utara dapat dilihat pada Gambar dibawah ini:



Gambar 1  
Peta Wilayah Kabupaten Halmahera Utara



### 1.2.2 Arti Lambang Kabupaten Halmahera Utara

Gambar 2  
Logo Kabupaten Halmahera Utara



1. Perisai besar dengan warna dasar biru bermakna sebagai suatu potensi sumber daya alam dengan berbagai kekayaan yang ada di Jazirah Halmahera Utara;

2. Humarang dan salawaku mempunyai makna sebagai kekuatan, keuletan, jati diri dan keadilan serta ketangguhan dalam membangun dan mempertahankan Wilayah Kabupaten Halmahera Utara; salawaku dengan sembilan bentuk hiasan putih menunjukkan bahwa Kabupaten Halmahera Utara pada saat diresmikan terdiri dari sembilan kecamatan yang memiliki nilai-nilai budaya dan tradisi serta menghargai dan menghormati semua etnis yang bergabung dalam satu kesatuan keluarga besar Hibualamo;
3. Daun kelapa berwarna hijau dengan 31 (tiga puluh satu) helai bermakna kesuburan, mencerminkan potensi kekayaan alam, kehidupan dan kemampuan pengelolaannya dimana kelapa sebagai komoditi unggulan Halmahera Utara. 31 (tiga puluh satu) helai daun kelapa juga bermakna tanggal peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu tanggal 31;
4. Lingkaran putih besar yang dihiasi dengan 10 (sepuluh) suku dan soa. Secara filosofi merupakan suatu komitmen masyarakat untuk hidup bersama-sama berdampingan secara damai, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai walaupun berbeda suku, agama dan golongan. Juga lingkaran putih sebagai penghias kemudi perahu bermakna berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Halmahera Utara;
5. Segi lima berwarna kuning keemasan bermakna Pancasila sebagai dasar filsafat Negara. Juga segi lima bermakna bulan peresmian Kabupaten Halmahera Utara yaitu bulan Mei;
6. Laut dan gelombang melambangkan dinamika kehidupan masyarakat Halmahera Utara yang berjuang dan tangguh menghadapi segala tantangan dan rintangan kehidupan dalam upaya mengembangkan kehidupan yang lebih baik. Pancaran ombak berwarna putih yang menghiasi keindahan di sekitar perahu, bermakna bersih, suci, lahir dan bathin, sebagai prinsip penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Halmahera Utara;
7. Perahu berwarna coklat, sebagai lambang perahu adat masyarakat Halmahera Utara bermakna sebagai sarana kehidupan, mata pencaharian dan alat transportasi. Warna coklat bermakna kearifan dan kewibawaan masyarakat Halmahera Utara untuk berjuang mencapai masa depan yang damai, adil dan sejahtera;
8. Warna putih dalam perisai segi lima melambangkan kesucian dan pengalaman nilai-nilai Pancasila dan kearifan budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
9. Hibua Lamo berwarna putih bersih dengan empat tiang penyangga berwarna hitam bermakna rumah adat masyarakat Halmahera Utara yang artinya rumah besar yang dapat mempersatukan semua jenis etnis dengan perbedaan suku dan ras dalam satu atap agar tetap menjaga persatuan dan kesatuan sehingga tidak mudah dipermainkan oleh siapapun yang ingin merusak tatanan dan norma pendidikan, harmonis dan demokratis yang telah dibina selama ini. Pita merah putih bertuliskan Hibua Lamo bermakna keberanian dan kesucian Halmahera Utara untuk membela dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
10. Angka 2003 bermakna sebagai tahun terbentuknya Kabupaten Halmahera Utara.

### 1.2.3 Pembagian Wilayah Administrasi

Secara administratif Kabupaten Halmahera Utara terdiri dari 17 kecamatan dan 196 Desa, dan Kecamatan Kao Barat merupakan kecamatan terbesar dengan luas 596,70 km<sup>2</sup> dan wilayah kecamatan terkecil adalah Tobelo Selatan dengan luas 33,00 km<sup>2</sup>, seperti terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1  
Wilayah Administrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara

| No           | Nama Kecamatan   | Jumlah Desa | Nama Ibu Kota Kecamatan | Jarak Dari Ibu Kota Kabupaten |
|--------------|------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1            | Tobelo           | 10          | Gamsungi                | 0 Km                          |
| 2            | Tobelo Tengah    | 9           | Pitu                    | 3.5 Km                        |
| 3            | Tobelo Utara     | 10          | Gorua                   | 5 Km                          |
| 4            | Tobelo Selatan   | 13          | Kupa-Kupa               | 13 Km                         |
| 5            | Tobelo Timur     | 6           | Mawea                   | 21 Km                         |
| 6            | Tobelo Barat     | 5           | Kusuri                  | 28 Km                         |
| 7            | Galela           | 7           | Soasio                  | 26 Km                         |
| 8            | Galela Utara     | 12          | Salimuli                | 56 Km                         |
| 9            | Galela Selatan   | 7           | Soakonora               | 33 Km                         |
| 10           | Galela Barat     | 9           | Dokulamo                | 40 Km                         |
| 11           | Kao              | 14          | Kao                     | 81 Km                         |
| 12           | Kao Utara        | 12          | Daru                    | 61 Km                         |
| 13           | Kao Barat        | 21          | Tolabit                 | 123 Km                        |
| 14           | Kao Teluk        | 11          | Dum-Dum                 | 133 Km                        |
| 15           | Malifut          | 22          | Ngofakiaha              | 98 Km                         |
| 16           | Loloda Utara     | 18          | Dorume                  | 80 Km                         |
| 17           | Loloda Kepulauan | 10          | Dama                    | 88.5 Km                       |
| <b>Total</b> |                  | <b>196</b>  |                         |                               |

Sumber Data Bappeda Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020

### 1.2.4 Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara pada akhir Tahun 2020, berdasarkan data penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara sebanyak **200.491** orang. Kecamatan Tobelo merupakan penduduk terbanyak dengan jumlah **33.632** jiwa, sedangkan Kecamatan Tobelo Barat adalah Kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu **6.455** jiwa, dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2  
Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk tahun 2020

| NO | KECAMATAN        | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) |
|----|------------------|------------------------|
| 1  | Tobelo           | 33.632                 |
| 2  | Tobelo Tengah    | 15.996                 |
| 3  | Tobelo Utara     | 11.863                 |
| 4  | Tobelo Timur     | 7.079                  |
| 5  | Tobelo Selatan   | 15.341                 |
| 6  | Tobelo Barat     | 6.455                  |
| 7  | Galela           | 9.012                  |
| 8  | Galela Selatan   | 9.022                  |
| 9  | Galela Barat     | 11.113                 |
| 10 | Galela Utara     | 9.308                  |
| 11 | Loloda Kepulauan | 8.225                  |
| 12 | Loloda Utara     | 10.740                 |
| 13 | Kao              | 9.477                  |
| 14 | Kao Barat        | 9.442                  |

| NO           | KECAMATAN | JUMLAH PENDUDUK (JIWA) |
|--------------|-----------|------------------------|
| 15           | Kao Utara | 13.973                 |
| 16           | Malifut   | 13.206                 |
| 17           | Kao Teluk | 6.607                  |
| <b>Total</b> |           | <b>200.491</b>         |

Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tahun 2020

### 1.2.5 Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Ekonomi Makro daerah merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur dan menjelaskan kondisi perekonomian daerah dari tahun ke tahun. Indikator-indikator tersebut ini meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Perkapita dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Pencapaian dari indikator-indikator ini terjadi akibat akumulasi pencapaian kinerja sektor perekonomian yang melibatkan berbagai faktor produksi dalam transaksi barang dan jasa. PDRB adalah jumlah nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada satu tahun tertentu sebagai dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun. Dengan demikian, PDRB merupakan indikator untuk mengukur sampai sejauh mana keberhasilan pemerintah dalam memanfaatkan sumber daya yang ada dan dapat digunakan sebagai perencanaan dan pengambilan keputusan. PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di wilayah itu. Sementara Pendapatan Perkapita adalah total pendapatan suatu daerah dibagi jumlah penduduk di daerah tersebut untuk tahun yang sama. Angka ini didapat dari total PDRB atas harga pasar dibagi dengan jumlah penduduk.

Sektor-sektor yang memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB Kabupaten Halmahera Utara antara lain Sektor Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. PDRB dan Pendapatan Perkapita Kabupaten Halmahera Utara dalam dua tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3  
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

| Sektor/Lapangan Usaha                                         | Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Halmahera Utara (Persen) |       |       |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
|                                                               | 2018                                                                                                | 2019  | 2020  |
| Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 22,39                                                                                               | 22,78 | 23,18 |
| Pertambangan dan Penggalian                                   | 32,03                                                                                               | 28,99 | 29,73 |
| Industri Pengolahan                                           | 3,41                                                                                                | 3,31  | 2,95  |
| Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0,08                                                                                                | 0,08  | 0,08  |
| Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang      | 0,09                                                                                                | 0,09  | 0,09  |
| Konstruksi                                                    | 6,06                                                                                                | 6,79  | 6,93  |
| Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 12,37                                                                                               | 13,31 | 12,56 |

| Sektor/Lapangan Usaha                                          | Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha, Kabupaten Halmahera Utara (Persen) |               |               |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
|                                                                | 2018                                                                                                | 2019          | 2020          |
| Transportasi dan Pergudangan                                   | 2,23                                                                                                | 2,31          | 2,10          |
| Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 0,29                                                                                                | 0,30          | 0,28          |
| Informasi dan Komunikasi                                       | 2,50                                                                                                | 2,55          | 2,65          |
| Jasa Keuangan dan Asuransi                                     | 1,49                                                                                                | 1,58          | 1,58          |
| Real Estate                                                    | 0,06                                                                                                | 0,07          | 0,07          |
| Jasa Perusahaan                                                | 0,10                                                                                                | 0,10          | 0,10          |
| Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 12,12                                                                                               | 12,80         | 12,67         |
| Jasa Pendidikan                                                | 2,76                                                                                                | 2,81          | 2,77          |
| Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 1,60                                                                                                | 1,70          | 1,81          |
| Jasa lainnya                                                   | 0,42                                                                                                | 0,44          | 0,44          |
| <b>Indeks Total</b>                                            | <b>100,00</b>                                                                                       | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber Data BPS Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

### 1.3 ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dalam ketentuan Umum dijelaskan bahwa Perangkat Daerah Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.

Pengelompokan Organisasi Perangkat Daerah didasarkan pada konsepsi pembentukan organisasi yang terdiri atas 5 (lima) elemen, yaitu Kepala Daerah (*strategic apex*), Sekretaris Daerah (*middle line*), Dinas Daerah (*operating core*), Badan/Fungsi Penunjang (*technostructure*), dan Staf Pendukung (*supporting staff*). Dinas Daerah merupakan pelaksana fungsi inti (*operating core*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus sesuai bidang urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Badan Daerah melaksanakan fungsi penunjang (*technostructure*) yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pembantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi mengatur dan mengurus untuk menunjang kelancaran pelaksanaan fungsi inti (*operating core*).

Perubahan signifikan dari pembentukan perangkat daerah adalah adanya urusan yang diserahkan kepada daerah yakni urusan wajib merupakan urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua daerah dan urusan pilihan yakni urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah serta penetapan tipe perangkat daerah didasarkan pada perhitungan jumlah nilai variabel beban kerja. Variabel beban kerja terdiri dari variabel umum dan variabel teknis.

Unsur pembantu Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 7 (tujuh) Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016, sebagai berikut:

1. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat Daerah;
2. Unsur Staf diwadahi dalam bentuk Sekretariat DPRD;



3. Unsur penunjang yang khusus melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Inspektorat Daerah;
4. Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah diwadahi dalam bentuk Dinas Daerah;
5. Unsur pelaksana fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah diwadahi dalam bentuk Badan Daerah; dan
6. Kecamatan sebagai unsur kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara berjumlah 48 Organisasi Perangkat Daerah yang terdiri dari 22 Dinas, 6 Badan, 2 Sekretariat, 1 Inspektorat dan 17 Kecamatan.

Tabel 4  
Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

| ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO                          |             |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1                           | SEKRETARIAT | 1  | SEKRETARIAT DAERAH <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bagian Tata Pemerintahan</li> <li>- Bagian Hukum dan HAM</li> <li>- Bagian Organisasi</li> <li>- Bagian Perekonomi dan Kesra</li> <li>- Bagian Umum dan Perlengkapan</li> <li>- Bagian Adm. dan Pengendalian Pembangunan</li> <li>- Bagian Unit Layanan Pengadaan</li> <li>- Bagian Sekretariat Korpri</li> </ul> |
|                             |             | 2  | SEKRETARIAT DPRD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                           | INSPEKTORAT | 3  | Inspektorat Kabupaten Halmahera Utara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 3                           | DINAS       | 4  | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |             | 5  | Dinas Kesehatan <ul style="list-style-type: none"> <li>- RSUD Tobelo</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |             | 6  | Dinas Pariwisata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |             | 7  | Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |             | 8  | Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |             | 9  | Dinas Perdagangan dan Perindustrian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                             |             | 10 | Dinas Sosial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |             | 11 | Dinas Kependudukan dan Capil                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |             | 12 | Dinas Pertanian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |             | 13 | Dinas Kelautan dan Perikanan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                             |             | 14 | Dinas Perhubungan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                             |             | 15 | Dinas Pemberdayaan Perempuan, PA & KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                             |             | 16 | Dinas Lingkungan Hidup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |             | 17 | Dinas Ketahanan Pangan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                             |             | 18 | Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                             |             | 19 | Dinas Penanaman Modal dan PTSP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                             |             | 20 | Dinas Satpol PP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                             |             | 21 | Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                             |             | 22 | Dinas Pemuda dan Olahraga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| NO | ORGANISASI PERANGKAT DAERAH |    |                                             |
|----|-----------------------------|----|---------------------------------------------|
| 4  | BADAN                       | 23 | Dinas Koperasi dan UMKM                     |
|    |                             | 24 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi         |
|    |                             | 25 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa      |
|    |                             | 26 | Badan Keuangan dan Aset Daerah              |
|    |                             | 27 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah        |
|    |                             | 28 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik           |
|    |                             | 29 | Badan Kepegawaian Daerah & Pengembangan SDA |
|    |                             | 30 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah         |
| 5  | KECAMATAN                   | 31 | Badan Penelitian Pengembangan dan Statistik |
|    |                             | 32 | Kantor Camat Kao Teluk                      |
|    |                             | 33 | Kantor Camat Malifut                        |
|    |                             | 34 | Kantor Camat Kao                            |
|    |                             | 35 | Kantor Camat Kao Barat                      |
|    |                             | 36 | Kantor Camat Kao Utara                      |
|    |                             | 37 | Kantor Camat Tobelo Barat                   |
|    |                             | 38 | Kantor Camat Tobelo Timur                   |
|    |                             | 39 | Kantor Camat Tobelo Selatan                 |
|    |                             | 40 | Kantor Camat Tobelo Tengah                  |
|    |                             | 41 | Kantor Camat Tobelo                         |
|    |                             | 42 | Kantor Camat Tobelo Utara                   |
|    |                             | 43 | Kantor Camat Galela                         |
|    |                             | 44 | Kantor Camat Galela Selatan                 |
|    |                             | 45 | Kantor Camat Galela Barat                   |
|    |                             | 46 | Kantor Camat Galela Utara                   |
|    |                             | 47 | Kantor Camat Loloda Utara                   |
|    |                             | 48 | Kantor Camat Loloda Kepulauan               |

Sumber Data Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara

#### 1.4 SUMBER DAYA APARATUR

Dalam menyelenggarakan kewenangan daerah yang dijabarkan dalam tugas pokok dan fungsi, salah satu pendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan adalah tersedianya sumber daya manusia aparatur yang memadai sesuai dengan kebutuhan. Adapun jumlah aparatur sipil negara di Kabupaten Halmahera Utara sampai dengan akhir tahun 2020 yang masih melaksanakan tugas sebanyak **3.476** orang, terdiri dari laki-laki **1.573** orang dan perempuan **1.903** orang, sesuai tabel berikut ini:

Tabel 5  
Aparatur Sipil Negara berdasarkan Pendidikan

| No | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 1  | SD/Sederajat       | 10        | -         | 10     |
| 2  | SLTP/Sederajat     | 19        | 1         | 20     |
| 3  | SLTA/Sederajat     | 653       | 567       | 1.220  |
| 4  | Diploma I,II,III   | 303       | 780       | 1.083  |

| No            | Tingkat Pendidikan | Laki-Laki    | Perempuan    | Jumlah       |
|---------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
| 5             | Diploma IV/S1      | 544          | 545          | 1.089        |
| 6             | Strata 2           | 43           | 10           | 53           |
| 7             | Strata 3           | 1            | -            | 1            |
| <b>Jumlah</b> |                    | <b>1.573</b> | <b>1.903</b> | <b>3.476</b> |

Sumber Data BKD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

## 1.5 PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Permasalahan klasik yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah kesenjangan antara apa yang diharapkan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah. Skla prioritas adalah merupakan strategi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah melalui program kegiatan pemerintah daerah. yang dapat dilihat pada data informasi urusan penyelenggaraan pemerintahan baik urusan wajib, urusan pilihan, maupun urusan fungsi penunjang pemerintahan.

Permasalahan pembangunan di Kabupaten Halmahera Utara dapat diuraikan berdasarkan data dan informasi setiap urusan penyelenggara pemerintahan daerah. Identifikasi permasalahan dilakukan terhadap lingkungan internal maupun eksternal dengan mempertimbangkan masukan dari Perangkat Daerah.

### 1. URUSAN WAJIB

#### PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Belum meratanya akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat
- Tingkat kompetensi pendidik masih rendah
- Sarana dan prasarana peningkatan pendidikan belum memadai
- Manajemen pengelolaan lembaga pendidikan belum dikelola dengan baik
- Rendahnya pemanfaatan sistem teknologi dan informasi
- Belum meratanya tenaga kependidikan di sebagian wilayah

#### KEBUDAYAAN

- Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya pelestarian situs budaya dan seni budaya
- Pengembangan kelompok seni dan budaya masih kurang
- Fasilitas sarana dan prasarana guna pengembangan seni budaya daerah masih terbatas

#### KESEHATAN

- Rendahnya status kesehatan Angka Kematian Ibu dan Bayi
- Masih tingginya angka penyakit menular (TB, HIV-AIDS, Malaria DB, dan Kasus Gigitan Anjing)
- Belum semua Puskesmas terakreditasi
- Terbatasnya tenaga kesehatan (kuantitas dan kualitas) dan distribusi yang tidak merata

- e. Masih kurangnya sarana prasarana kesehatan
- f. Belum semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan
- g. Belum adanya sistim Informasi kesehatan
- h. Belum semua sarana kesehatan mempunyai pengelolaan limbah medis serta sarana kesehatan yang sudah mempunyai pengelolaan limbah medis belum berfungsi dengan baik.

#### PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

- a. Kondisi jalan/jembatan masih rendah
- b. Masih ada jaringan jalan belum terbangun pada daerah-daerah tertentu.
- c. Minimnya prasarana air bersih dan sanitasi yang layak.
- d. Masih kurangnya pembangunan drainase sekunder dan tersier
- e. Terbatasnya sarana dan prasarana irigasi yang tersedia serta menurunnya fungsi jaringan irigasi terbangun
- f. Kurangnya peran serta masyarakat dalam pemeliharaan prasarana pengairan dan konservasi sumberdaya air
- g. Belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur tentang Daerah Milik Jalan (DAMIJA) Daerah Manfaat Jalan (DAMAJA) Daerah Pengawasan Jalan
- h. Belum optimalnya peran serta masyarakat dan pelaku usaha dalam pemanfaatan ruang sesuai perundang-undangan yang berlaku
- i. Belum optimalnya peran TKPRD dalam mengendalikan pemanfaatan ruang
- j. Belum tersedianya data base infrastruktur ke-PU-an.

#### PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

- a. Belum tersedianya data base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- b. Masih kurangnya kepemilikan lahan bersertifikat.
- c. Belum tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah
- d. Masih kurangnya rasio bangunan ber-IMB yang belum sesuai target.
- e. Luasan kawasan kumuh belum terpetakkan
- f. Data pembahasan lahan yang bersertifikat belum terupdate
- g. Belum tersedianya data base status kepemilikan lahan/tanah.
- h. Masih ada pemukiman kumuh di daerah perkotaan

#### KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

##### SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- a. Masih lemahnya penegakan Perda
- b. Tingginya konflik kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan
- c. Kurangnya SDM Linmas baik kualitas maupun kuantitas
- d. Masih terbatasnya sarana dan prasarana DAMKAR

## KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

- a. Masih rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam menggunakan hak politik pada Pemilihan Umum
- b. Masih tingginya potensi terjadinya konflik politik pasca
- c. Minimnya kegiatan forum kerukunan antar umat beragama
- d. Potensi terjadinya konflik di wilayah perbatasan.

## SOSIAL

- a. Masih tingginya penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
- b. Belum tersedianya Data base kemiskinan.

## PENANGGULANGAN BENCANA

- a. Persentase kapasitas kesiagaan di daerah rawan bencana masih rendah
- b. Responsitas dalam penanggulangan bencana belum sesuai waktu tanggap
- c. Terbatasnya sarana prasarana dalam penanggulangan bencana
- d. Belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi
- e. Minimnya system informasi peringatan dini bencana
- f. SDM penanggulangan bencana belum optimal
- g. Persentase penyelesaian rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana belum optimal

## TENAGA KERJA

- a. Angka pengangguran yang masih tinggi
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana BLK
- d. Masih terbatasnya system informasi ketenagakerjaan

## TRANSMIGRASI

- a. Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi Ketransmigrasian
- b. Ketersediaan lahan untuk pembangunan transmigrasi dibatasi oleh kawasan hutan
- c. Belum ditetapkan Kota Terpadu Mandiri di Kawasan Transmigrasi

## PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KB

- a. Rasio Tingkat kasus KDRT yang masih tinggi
- b. Rendahnya Cakupan peserta KB aktif
- c. Masih rendahnya jumlah pengaduan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak
- d. Tingginya kasus kenakalan anak/remaja yang memerlukan perlindungan khusus dan memperoleh pelayanan
- e. Rendahnya partisipasi perempuan di lembaga Legislatif dan Swasta.
- f. Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera 1 belum memenuhi target



## KETAHANAN PANGAN

- a. Skor PPH ketersediaan pangan belum beragam dan seimbang (PPH rendah)
- b. Belum tercapainya ketersediaan pangan utama dalam peningkatan ketahanan pangan
- c. Masih terbatasnya stok cadangan pangan daerah
- d. Sarana prasarana dalam penunjang keamanan pangan belum tersedia
- e. Masih terbatasnya lumbung pangan di sentra produksi swasembada pangan
- f. Informasi ketersediaan dan distribusi pangan masih rendah
- g. Harga pangan yang fluktuatif

## LINGKUNGAN HIDUP

- a. Belum optimalnya penanganan sampah dan limbah B3
- b. Belum ada dokumen analisis dan kajian lingkungan
- c. belum terukurnya indeks kualitas lingkungan hidup atau IKLH
- d. Rendahnya pengawasan dokumen AMDAL
- e. kesadaran masyarakat tentang sampah masih kurang
- f. Tempat pembuangan akhir persatuan penduduk belum memenuhi target
- g. belum ada ketentuan tentang pengelolaan sampah dan limbah di daerah
- h. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai pemanfaatan hutan
- i. Pemanfaatan sumber daya hutan yang tidak menerapkan prinsip-prinsip kelestarian
- j. Terbatasnya Pengawasan pengelolaan/pemanfaatan hasil hutan
- k. Tingginya polusi udara karena abu gunung

## ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

- a. Belum optimalnya sosialisasi tentang administrasi kependudukan
- b. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membuat akta kelahiran
- c. Belum memadainya perangkat teknologi informasi dan sarana prasarana pendukung rusan kependudukan dan catatan sipil.

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

- a. Masih rendahnya jumlah kelompok binaan LPM
- b. Belum adanya pengembangan kawasan perdesaan
- c. Sarana dan prasarana pendukung tugas Pemerintah Desa yang belum memadai
- d. Belum optimalnya peranan Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam mendorong dan menggerakkan peran serta masyarakat dalam pembangunan isu lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang
- e. masih terbatasnya pengetahuan Aparatur Pemerintahan Desa dalam pengelolaan manajemen desa
- f. minimnya pemahaman aparatur penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya meningkatnya kapasitas pelayanan PKK

## PERHUBUNGAN

- a. Penyediaan sarana prasarana transportasi publik masih belum optimal
- b. Prasarana dan pelayanan pelabuhan laut antar pulau masih kurang
- c. Prasarana dan pelayanan pelabuhan udara antar kota masih kurang
- d. Ketidak seimbangan antara pertambahan jumlah prasarana alan/volume jalan dengan pertumbuhan kendaraan
- e. Belum adanya payung hukum peraturan pemerintah tentang lalu lintas dan angkutan jalan
- f. Minimnya kesadaran pengguna jasa transportasi akan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku
- g. Kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

## KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

- a. Belum optimalnya jumlah desa yang terkoneksi telepon dan internet
- b. Ketersediaan data di website pemda belum ter-update secara optimal
- c. Areal blank spot belum terjangkau secara merata
- d. Terbatasnya sarana prasarana BTS
- e. Belum ada regulasi bidang komunikasi, informatika dan persandian
- f. Terbatasnya sarana dan prasarana pos dan telematika
- g. Kurangnya SDM yang menguasai TIK guna mendukung pemanfaatan sistem informasi manajemen dan jaringan e-government

## KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

- a. Masih rendahnya akses permodalan
- b. Belum Optimalnya kualitas, kuantitas, kontinuitas dan sarana prasarana produk koperasi dan Unit Usaha Mikro, dan UKM
- c. Masih banyaknya UMKN yang bergerak di sektor informal (belum berbadan hukum)
- d. Kurangnya tingkat partisipasi pelaku usaha
- e. Kurang Optimalnya pelatihan ketrampilan terhadap produksi perkembangan pasar
- f. Sistem Pemasaran dan sarana pasar masih kurang
- g. Masih rendahnya Sistem Pemasaran dan Promosi
- h. Belum adanya Regulasi di Bidang UKM

## PENANAMAN MODAL DAN PTSP

- a. Masih rendahnya realisasi investasi PMDN dan PMA
- b. Belum optimalnya kinerja pelayanan perijinan usaha (pelayanan terpadu satu pintu)
- c. Sarana prasarana pelayanan perijinan masih kurang memadai
- d. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan
- e. Kinerja penanaman modal dalam rangka menciptakan peluang investasi dan promosi belum optimal (Jumlah investor skala nasional dan asing masih kurang)

## KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

- a. Belum optimalnya pembinaan secara kontinyu kepada para atlit serta belum memadainya sarana prasarana olahraga yang ada
- b. Masih minimnya jumlah pembinaan aktif cabang-cabang olahraga yang akan diperlombakan
- c. Pembinaan oranisasi kepemudaan belum optimal
- d. Masih minimnya sarana prasarana olahraga
- e. Belum tersedianya gedung pusat pelatihan olahraga
- f. Belum optimalnya pembinaan bagi kelompok pemuda yang berpotensi
- g. Kurang tersedianya sarana pelatihan pemuda atau balai latihan kepemudaan
- h. Belum optimalnya minat peserta penyandang cacat pada kegiatan lomba olahraga
- i. Belum maksimalnya informasi yang diterima masyarakat terkait pameran prestasi hasil karya kepemudaan
- j. Kurangnya klub-klub olahraga berprestasi

## KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

- a. Belum tersedianya sarana dan prasarana perpustakaan umum daerah, perpustakaan desa dan perpustakaan sekolah yang memadai
- b. Kurangnya minat baca, sehingga pengunjung tidak sesuai dengan target
- c. Belum optimalnya SDM pengelola kearsipan pemerintah daerah, BUMD, sekolah dan perguruan tinggi
- d. Belum optimalnya pengawasan dan pembinaan kearsipan SKPD, BUMD, sekolah/ perguruan tinggi, kecamatan/desa dan ORMAS
- e. Perlu adanya pembangunan depo arsip, sebagai syarat akreditasi dan pengawasan kearsipan pemda
- f. Belum tersedianya sistem kearsipan berbasis teknologi informasi

## 2. URUSAN PILIHAN

### KELAUTAN PERIKANAN

- a. Masih rendahnya sistem alih teknologi dan diseminasi teknologi pengolahan produk perikanan.
- b. Belum optimalnya usaha perikanan budidaya, perikanan tangkap dan pengolahan ikan.
- c. Belum optimalnya pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan (SDKP);
- d. Infrastruktur dan sarana prasarana untuk nelayan belum memadai.
- e. Sinergitas program pemerintah daerah dengan program nasional belum optimal dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan
- f. Minimnya tenaga penyuluh perikanan ramah lingkungan
- g. Belum Optimalnya Ketersediaan Kualitas dan Kuantitas Bibit ikan dibidang perikanan

### PARIWISATA

- a. Pemanfaatan pengelolaan destinasi wisata belum optimal dilakukan.
- b. Pariwisata berbasis budaya lokal belum maksimal.

- c. Kondisi sarana dan prasarana pendukung destinasi wisata belum memadai
- d. Pelayanan dan sikap masyarakat di destinasi wisata belum menciptakan sapta pesona
- e. Kurangnya produk wisata yang atraktif, inovatif, dan edukatif
- f. Terbatasnya data dan system informasi pariwisata berbasis web
- g. Belum optimalnya promosi dan pemasaran pariwisata

#### PERTANIAN

- a. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRD masih rendah
- b. Belum optimalnya Nilai Tukar Petani (NTP)
- c. Tingkat kemampuan kelompok tani masih rendah
- d. Kurangnya tenaga penyuluh pertanian dalam melaksanakan pendampingan
- e. Belum meratanya pertumbuhan dunia usaha, lembaga-lembaga permodalan dan pemasaran pada sentra sentra produksi.
- f. Belum optimalnya produksi dan produktivitas pertanian
- g. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perkebunan
- h. Intensitas serangan hama seksava pada tanaman kelapa masih tinggi
- i. Masih terjadinya kasus penyebaran wabah penyakit ternak
- j. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan
- k. Kuantitas dan kualitas produk pertanian belum mendukung berkembangnya agro industry

#### PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN

- a. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di bidang Perindustrian dan Perdagangan,
- b. Belum adanya UPTD Metrologi maupun Balai Pengujian Mutu Barang yang menunjang pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa
- c. Belum ada perda yang memperkuat pengembangan di bidang Perindustrian dan Perdagangan
- d. Minimnya pola Kemitraan dalam menunjang kegiatan kewirusahaan
- e. Rendahnya kapasitas permodalan dalam mendukung kegiatan industri
- f. Belum optimalnya pemasaran produk hasil industri dan perdagangan
- g. Belum optimalnya investasi pengembangan sector Energi Sumber Daya Mineral (ESDM)
- h. Belum optimalnya pelaksanaan prinsip good mining practices (pertambangan yang bersih dan benar)
- i. Masih Kurangnya Pengawasan dan Pengendalian harga pasar
- j. Distribusi Kebutuhan pokok belum merata

### **3. ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**

#### SEKRETARIAT DAERAH

- a. Kesadaran untuk tertib administrasi keuangan masih rendah;
- b. Belum tersedianya SDM penyusun Produk Hukum Daerah yakni Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

- c. Koordinasi antara instansi terkait berjalan kurang baik dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah;
- d. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Keagamaan terhadap masyarakat;
- e. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Perekonomian Rakyat;
- f. Belum sinkronnya program dan kegiatan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi maupun dengan kementerian/lembaga lainnya;
- g. Minimnya data pendukung sebagai akibat dari minimnya koordinasi antar pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kementerian/lembaga terkait lainnya;
- h. Kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh instansi terkait serta kurangnya aparatur yang kompeten sangat mempengaruhi usaha untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal.
- i. Efektifitas dan efisiensi kerja dan pelayanan aparatur kepada publik belum optimal

#### ORGANISASI

- a. Belum optimalnya penataan perangkat daerah;
- b. Nilai SAKIP masih rendah;
- c. Indeks Kepuasan Pelayanan Publik masih rendah;

#### HUMAS DAN PROTOKOLER

- a. Belum optimalnya publikasi kegiatan Kepala Daerah;
- b. Sarana prasarana yang belum memadai;
- c. Kualitas SDM humas dan protokol masih kurang Perekonomian dan Kesra;
- d. Belum tersedianya dokumen petunjuk teknis di bidang pelayanan Perekonomian Rakyat;
- e. Isu kegiatan keagamaan

#### ULP

- a. ULP masih bersifat ad hoc
- b. Masih minimnya kualitas dan kuantitas SDM;
- c. Masih minimnya partisipasi peserta dalam mengikuti lelang secara elektronik.

#### ADMINISTRASI DAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN

- a. Belum optimalnya pengelolaan pengendalian pembangunan;

#### TATA PEMERINTAHAN

- a. Batas wilayah antar kabupaten;
- b. Pengembangan DOB;

#### HUKUM DAN HAM

- a. Kualitas dan Kuantitas SDM penyusun Produk Hukum Daerah masih kurang;

- b. Koordinasi antara instansi terkait berjalan kurang baik dalam hal penyusunan Produk Hukum Daerah

#### KORPI

- a. Belum optimalnya pembinaan PNS/ASN

#### SEKRETARIAT DPRD

- a. Kurang tersedianya sarana dan prasarana yang memadai dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
- b. Belum Lengkapnya Standar Operasional Prosedur (SOP) secara teknis sehingga pengawasan internal masih kurang optimal

#### INSPEKTORAT

- a. Minimnya kuantitas dan kualitas aparatur pengawasan keuangan serta minimnya sarana dan prasarana pengawasan keuangan dan inspektorat
- b. Pengawasan lebih diarahkan pada pengawasan represif (penanganan setelah terjadi penyimpangan) dari pengawasan preventif (pencegahan sebelum terjadi penyimpangan).
- c. Intensitas pengawasan memberikorelasi positif terhadap tingkat penyimpangan. Sejauh ini, jumlah unit kerja yang diawasi secara regular belum mencapai 25% dari setiap tahunnya
- d. Pengaduan masyarakat belum tertangani secara optimal.
- e. Evaluasi kinerja belum dapat dilaksanakan pada seluruh SKPD dan belum dilakukan pemantauan capaian kinerja secara berkala
- f. Tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP maupun BPK-RI sampai dengan tahun 2015 baru mencapai 72%.
- g. Hasil pengawasan yang kurang obyektif, transparan, dan akuntabel.
- h. Inspektorat belum maksimal menjalankan fungsi pendampingan/konsultasi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.
- i. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan

#### PERENCANAAN PEMBANGUNAN

- a. Dokumen perencanaan yang dihasilkan belum sepenuhnya selaras;
- b. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam menunjang proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan;
- c. Belum optimalnya koordinasi lintas sektor/PD dalam rangka penyusunan rencana pembangunan daerah atau penanganan masalah-masalah mendesak dan strategis di daerah;
- d. Kurangnya data dan informasi yang lengkap, akurat dan valid sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
- e. Perlunya peningkatan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan pembangunan daerah;
- f. Belum optimalnya pengendalian perencanaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah;



- g. Perlunya peningkatan kualitas maupun kuantitas aparatur perencana di Bappeda maupun pada Perangkat Daerah lainnya pemenuhan operasional perkantoran serta peralatan dan perlengkapan penunjang yang memadai dalam meningkatkan pengelolaan keuangan serta kinerja aparatur yang akuntabel;
- h. Perubahan kewenangan kabupaten/kota, polemik batas wilayah, laju pertumbuhan penduduk menyebabkan perubahan struktur dan pola ruang sehingga perlu dilakukan revisi terhadap RTRW Kab. Halmahera Utara 2012-2032 dalam penyiapan perencanaan penataan ruang yang baik, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

#### KEUANGAN DAN ASET DAERAH

- a. Persentase PAD mengalami penurunan
- b. Belum optimalnya pengelolaan aset daerah
- c. Belum diterapkan perencanaan dan penganggaran terpadu
- d. Intensifikasi sumber-sumber PAD

#### KEPEGAWAIAN DAERAH, DAN PENGEMBANGAN SDA

- a. Sarana dan Prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelayanan administrasi
- b. Terhambatnya penyampaian informasi Pegawai ASN secara cepat karena jangkauan lokasi SKPD/Kecamatan terpencil yang menyebar didaerah
- c. Terbatasnya personil yang menangani kepegawaian dengan jumlah Pegawai ASN yang mendapatkan pelayanan
- d. Kualitas dan kuantitas ASN disetiap SKPD masih kurang
- e. Jumlah ASN tidak seimbang dengan beban kerja
- f. Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal masih terbatas
- g. Jumlah pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural masih terbatas.

#### PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAERAH DAN STATISTIK

- a. Belum optimalnya penyediaan SDM, sarana dan prasarana bagi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan statistik.
- b. Belum optimalnya penelitian yang terarah dan aplikatif dibidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan inovasi dan teknologi
- c. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penelitian, pengembangan dan statistik sebagai sistem informasi daerah
- d. Pengolaan data base yang kurang optimal, aktual, faktual dan terukur
- e. Masih kurangnya pemetaan kajian yang sesuai dengan kebutuhan daerah
- f. Masih minimnya publikasi hasil penelitian terkait dengan bidang sosial, ekonomi, pemerintahan, pembangunan inovasi dan teknologi

Sistematika dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

**Bab I Pendahuluan**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

**Bab II Perencanaan Kinerja**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

**Bab III Akuntabilitas Kinerja**

Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

**Bab IV Penutup**

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.



## BAB II PERENCANAAN KINERJA



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 5 (lima) tahun atau yang disebut dengan Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah. Perencanaan strategis juga merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 merupakan dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap 5 (lima) tahun perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan ke dalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, disebutkan bahwa RPJM Daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional yang memuat arah Kebijakan Keuangan Daerah, Strategi Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah, Lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Program Kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Perencanaan kinerja merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya, Perencanaan kinerja juga merupakan aktivitas pengambilan keputusan di depan, tentang tingkat capaian kinerja yang diinginkan dan dihubungkan dengan pelaksanaan program/kegiatan. Perencanaan kinerja juga memberikan target tentang apa yang harus dicapai dalam pelaksanaan program/kegiatan.

Rencana Pembangunan Daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (periode 5 tahun) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun).

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 merupakan dokumen penjabaran dari Visi, Misi dan Program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara, yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam Periode 2016-2021.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), perencanaan merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global serta tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara di bawah kepemimpinan **Ir. Frans Manery** dan **Muhclis Tapi-Tapi, S.Ag** periode 2016-2021 yang didasarkan pada Analisis Lingkungan Strategik Lokal, Nasional dan Global yang diimplementasikan kedalam Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Tahun 2018 diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

#### 2.1.1. Visi & Misi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021, dengan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai sebuah dokumen perencanaan jangka menengah daerah yang merupakan sebuah rangkaian dokumen perencanaan daerah bersama-sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2005-2025. Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 sebagai berikut :

Tabel 6  
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

| Visi :<br>Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Halmahera Utara Melalui Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Profesional Dilandasi Kebersamaan Yang Berkeadilan |                                               |                                      |                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi                                                                                                                                                             | Tujuan                                        | Sasaran Strategis                    | Indikator Kinerja Utama                                                                                                                     |
| Misi : 1<br>Mewujudkan Pemerintahan yang Baik dan Pemerintahan Yang Bersih                                                                                       | Terwujudnya Pemerintahan Yang Baik dan Bersih | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan | 1) Opini BPK<br>2) Nilai SAKIP Pemerintah Daerah<br>3) Indeks Kepuasan Masyarakat<br>4) Persentase PD yang menggunakan Aplikasi Berbasis IT |

|                                                                                                           |                                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Misi : 2<br>Meningkatnya pelayanan Bidang Kesehatan, Pendidikan dan Infastruktur Dasar                    |                                                                                                                               | Meningkatnya Penegakan Hukum                                  | 1) Angka Kriminalitas                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Kesehatan                                                                              | Tewujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat                       | 1) Angka Kematian Bayi<br>2) Angka Kematian Ibu<br>3) Persentase Balita Kurang Gizi<br>4) Angka Usia Harapan Hidup<br>5) Indeks Pembangunan Manusia                                                                                                                                                |
|                                                                                                           | Meningkatnya Kualitas Pelayanan Bidang Pendidikan                                                                             | Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan                     | 1) Angka Melek Huruf<br>2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah<br>3) Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs<br>4) Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah                                                                                                                                |
|                                                                                                           | Meningkatnya Kaulitas Pelayanan Bidang Infastruktur Dasar                                                                     | Meningkatnya Infastruktur Dasar                               | 1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi<br>2) Persentase Desa Yang Di aliri Listrik<br>3) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik<br>4) Persentase Rumah Tangga Berakses Air Bersih<br>5) Rasio Jaringan Irigasi<br>6) Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat |
|                                                                                                           |                                                                                                                               | Meningkatnya Aksesibilitas transportasi informasi dan         | 1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik<br>2) Rasio Ketersediaan Jembatan<br>3) Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalulintas                                                                                                                                                             |
|                                                                                                           |                                                                                                                               | Terwujudnya pengendalian, pemanfaatan dan penataan/Lingkungan | 1) Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan<br>2) Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)                                                                                                                                                                                                         |
| Misi 3 :<br>Mewujudkan persamaan Hak dan Kedudukan bagi seluruh warga masyarakat berbagai Aspek Kehidupan | Mewujudkan Persamaan Hak dan Kedudukan Bagi seluruh warga Masyarakat dalam Berbagai Aspek Kehidupan Antara Seluruh masyarakat | Tewujudnya Kesetaraan gender                                  | 1) Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                    |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Misi : 4</b><br>Meningkatkan Pertumbuhan Perekonomian Daerah Melalui Optimalisasi potensi Kekayaan Alam Yang berwawasan Lingkungna dan Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan serta Mengurangi Angka Kemiskinan | Meningkatnya Pertumbuhan Perekonomian daerah melalui Optimalisasi Potensi Kekayaan Alam yang berwawasan Lingkungan | Terwujudnya Peningkatan pertumbuhan Ekonomi melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Peternakan, pariwisata dan Kelautan | 1) Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB<br>2) Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB<br>3) Produktivitas Padi dan Jagung (ton)<br>4) Kunjungan Wisata<br>5) Produksi Perikanan (ton) |
|                                                                                                                                                                                                            | Menumbuhkan Jiwa kewirausahaan                                                                                     | Meningkatnya Aksesibilitas pemodalan, Pemasaran dan Teknologi serta Promosi Produk UMKM                                                                     | 1) Jumlah investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)<br>2) Ekspor Bersih Perdagangan<br>3) Pertumbuhan Industri<br>4) Usaha Mikro Dan Kecil                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                            | Mengurangi Angka Kemiskinan                                                                                        | Menurunnya Angka Kemiskinan                                                                                                                                 | 1) Angka Kemiskinan<br>2) Rasio Ketergantungan<br>3) Tingkat partisipasi angkatan kerja<br>4) Indeks Gini<br>5) Laju Inflasi                                                                            |

Makna yang terkandung dalam Visi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Utara 2016-2021 adalah sebagai berikut:

1. **Pemerintahan yang baik**, artinya pemerintahan yang dijalankan didasarkan pada prinsip *good governance* dan *clean government* dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan setiap aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemerintahan harus berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya dapat mewujudkan persamaan hak dan kedudukan bagi warga dengan memiliki integritas diri yang kokoh, tidak mudah tergoda untuk memperkaya diri karena jabatan serta mampu melayani masyarakat dengan baik, tetapi memberikan keadilan dan ruang untuk bersaing secara sehat guna mewujudkan impian setiap masyarakat.
2. **Profesional**, artinya memahami secara benar dan mendalam tugas dan tanggungjawab sebagai aparatur pemerintah dan menjalankannya secara tepat sebagaimana yang seharusnya.
3. **Kebersamaan**, artinya pemerintah dalam menyusun strategi dan rencana pembangunan daerah, dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan seluruh stakeholders, sehingga strategi dan rencana pembangunan yang dihasilkan telah mengakomodir kepentingan masyarakat secara merata karena merupakan kontribusi pemikiran dari seluruh komponen masyarakat.
4. **Berkeadilan**, artinya bahwa dalam pembangunan terutama pembangunan ekonomi, daerah dalam hal ini organ-organ pemerintahan bertanggungjawab untuk menjamin pemerataan pendapatan, menjamin pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan dan



dinikmati seluruh masyarakat, dan melindungi masyarakat dari dampak negative pengaruh globalisasi ekonomi yang menghambat tercapainya kesejahteraan sosial.

### 2.1.2. Program

Program pembangunan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan adalah sebagai berikut:

Tabel 7  
Sasaran Strategis, Program dan Anggaran

| NO | SASARAN                                                 | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ANGGARAN           |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                  |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Pengembangan Sisitem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;</li> <li>2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;</li> <li>3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;</li> <li>4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;</li> <li>5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.</li> </ol> | Rp. 16.759.248.886 |
| 2  | Meningkatnya Penegakan Hukum                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;</li> <li>2. Program pendidikan politik masyarakat;</li> <li>3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;</li> <li>4. Program pengembangan wawasan kebangsaan;</li> <li>5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);</li> <li>6. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.</li> </ol>    | Rp. 1.755.565.540  |
| 3  | Terwujudnya Penanganan Bencana                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penanganan Darurat</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rp. 1.048.290.000  |

| NO | SASARAN                                  | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ANGGARAN            |
|----|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1  | 2                                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                   |
| 4  | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;</li> <li>2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;</li> <li>3. Program Pengawasan Obat dan Makanan;</li> <li>4. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;</li> <li>5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;</li> <li>6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;</li> <li>7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;</li> <li>8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program Sumber Daya Manusia Kesehatan;</li> <li>9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;</li> <li>10. Program Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;</li> <li>11. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan;</li> <li>12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;</li> <li>13. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;</li> <li>14. Program Keluarga Berencana;</li> <li>15. Program Penguatan Kelembagaan</li> </ol> | Rp. 151.366.036.163 |

| NO | SASARAN                                         | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ANGGARAN              |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4                     |
|    |                                                 | Pengarusutamaan Gender dan Anak;<br>16. Program pelayanan kontrasepsi;<br>17. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;<br>18. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.                                                                                                                 |                       |
| 5  | Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan Angka | 1. Program Pendidikan Usia dini;<br>2. Program Wajib belajar 9 tahun;<br>3. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan;<br>4. Program Pendidikan non formal;<br>5. Program pendidikan luar biasa (PLB);<br>6. Program Peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan;<br>7. Program manajemen pelayanan pendidikan. | Rp. 51.711.953.709,00 |
| 6  | Meningkatnya Infrastruktur Dasar                | 1. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah;<br>2. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong;<br>3. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lain;<br>4. Program Kegiatan DAK Pertanian.                                                                    | Rp. 18.344.670.711,82 |
| 7  | Meningkatnya Akseibilitas Transportasi          | 1. Program pembangunan jalan dan jembatan;<br>2. Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan;<br>3. Program pembangunan infrastruktur perdesaan;<br>4. Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas;<br>5. Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor.                                                    | Rp. 81.341.492.538,90 |

| NO | SASARAN                                                                                                                                          | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANGGARAN           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                  |
| 8  | Terwujudnya Kestaraan Gender                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;</li> <li>2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;</li> <li>3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kestaraan Jender Dalam Pembangunan.</li> </ol>                                                                                                                                                             | Rp. 249.767.616    |
| 9  | Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan;</li> <li>2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;</li> <li>3. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;</li> <li>4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;</li> <li>5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;</li> <li>6. Program Pengembangan Destinasi Wisata.</li> </ol>                    | Rp. 13.350.390.900 |
| 10 | Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;</li> <li>2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;</li> <li>3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;</li> <li>4. Program Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah (UKM);</li> <li>5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.</li> </ol> | Rp. 2.494.515.391  |
| 11 | Tersedianya Pengendalian, Pemanfatan Dan Penataan Ruang                                                                                          | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah;</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Rp. 29.394.539.600 |

| NO | SASARAN                     | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANGGARAN          |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                 |
|    |                             | 2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;<br>3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;<br>4. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;<br>5. Program rehabilitasi hutan dan lahan;<br>6. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;<br>7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;<br>8. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;<br>9. Program pengendalian kebakaran hutan;<br>10. Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan;<br>11. Program Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air dan daerah Imbuhan Air Tanah. |                   |
| 12 | Menurunnya Angka Kemiskinan | 1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);<br>2. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial;<br>3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;<br>4. Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rp. 3.002.928.879 |

| NO | SASARAN | PROGRAM                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ANGGARAN |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        |
|    |         | 5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;<br>6. Program peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;<br>7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;<br>8. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan;<br>9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi. |          |

## 2.2 PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja merupakan tekad dan janji yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Oleh karena itu, perjanjian kinerja ini menjadi kontrak kinerja yang harus diwujudkan dan merupakan tolok ukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk memberi gambaran tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2020 dalam rangka mewujudkan Visi, Misi serta Tujuan Kepala Daerah khususnya dalam memenuhi kinerja pada aspek kesejahteraan, layanan, dan daya saing. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, sebagai berikut :

Tabel 8  
Perjanjian Kinerja Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

| NO | SASARAN                                                 | INDIKATOR                                                      | SATUAN  | TARGET 2020 |
|----|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------|-------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                              | 4       | 5           |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih | Opini BPK                                                      | -       | WTP         |
|    |                                                         | Nilai Sakip Pemerintah Daerah                                  | -       | B           |
|    |                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | %       | 73          |
|    |                                                         | Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT            | %       | 43,5        |
| 2  | Meningkatnya Penegakan Hukum                            | Angka Kriminalitas                                             | /10.000 | 20,00       |
| 3  | Terwujudnya Penanganan Bencana                          | Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam | %       | 84,50       |



| NO | SASARAN                                                                                                                              | INDIKATOR                                                         | SATUAN      | TARGET 2020 |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                                                                                                                                    | 3                                                                 | 4           | 5           |
| 4  | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat                                                                                             | Angka Kematian Bayi                                               | /1.000 KH   | 8,75        |
|    |                                                                                                                                      | Angka Kematian Ibu                                                | /100.000 KH | 150         |
|    |                                                                                                                                      | Persentase Balita Kurang Gizi                                     | %           | 2,50        |
|    |                                                                                                                                      | Usia Harapan Hidup                                                | Tahun       | 69,50       |
|    |                                                                                                                                      | Indeks Pembangunan Manusia                                        | %           | 68,25       |
| 5  | Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan                                                                                            | Angka Melek Huruf                                                 | %           | 99,25       |
|    |                                                                                                                                      | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                                      | %           | 8,98        |
|    |                                                                                                                                      | Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs                       | %           | 95,75       |
|    |                                                                                                                                      | Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah               | %           | 75,25       |
| 6  | Meningkatnya Infrastruktur Dasar                                                                                                     | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                              | %           | 74,50       |
|    |                                                                                                                                      | Persentase jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih      | %           | 78,50       |
|    |                                                                                                                                      | Rasio Jaringan Irigasi                                            | M/HA        | 15,50       |
|    |                                                                                                                                      | Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | KM          | 30,50       |
|    |                                                                                                                                      | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik                | %           | 83,25       |
| 7  | Meningkatnya Akseibilitas Transportasi                                                                                               | Rasio Ketersediaan Jembatan                                       | %           | 79          |
|    |                                                                                                                                      | Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas                         | Kasus       | 50          |
| 8  | Terwujudnya Kesenjangan Gender                                                                                                       | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                              | %           | 73          |
| 9  | Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB              | %           | 20,10       |
|    |                                                                                                                                      | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB                         | %           | 5           |
|    |                                                                                                                                      | Produktifitas Padi dan Jagung (Ton)                               | Ton/HA      | 13,20       |
|    |                                                                                                                                      | Kunjungan Wisata                                                  | Wisatawan   | 65.200      |
|    |                                                                                                                                      | Produksi Perikanan (Ton)                                          | %           | 33.750      |
| 10 | Meningkatnya Akseibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM                                               | Jumlah Infestor Berskala Nasional (PMDN/PMA)                      | Investor    | 390         |
|    |                                                                                                                                      | Pertumbuhan Industri                                              | %           | 18,00       |
|    |                                                                                                                                      | Usaha Mikro dan Kecil                                             | %           | 50          |

| NO | SASARAN                                                 | INDIKATOR                                  | SATUAN   | TARGET 2020 |
|----|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------|-------------|
| 1  | 2                                                       | 3                                          | 4        | 5           |
| 11 | Tersedianya Pengendalian, Pemanfatan Dan Penataan Ruang | Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan | Bangunan | 0,06        |
|    |                                                         | Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)     | %        | 79,50       |
| 12 | Menurunnya Angka Kemiskinan                             | Angka Kemiskinan                           | %        | 3,91        |
|    |                                                         | Rasio Ketergantungan                       | %        | 43,10       |
|    |                                                         | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja         | %        | 84,50       |
|    |                                                         | Indeks Gini                                | -        | 0,25        |
|    |                                                         | Laju Inflasi                               | -        | 3,51        |



## BAB III AKUNTABILITAS KINERJA



Akuntabilitas dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara tidak terlepas dari rangkaian mekanisme fungsi perencanaan yang dilaksanakan, mulai Perencanaan Strategis (Renstra), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Dari perencanaan yang sudah dibuat kemudian dikukuhkan dalam Perjanjian Kinerja selanjutnya setelah tahun anggaran berakhir maka apa yang sudah direncanakan dan diperjanjikan harus diukur dan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban publik.

### 3.1 CAPAIAN KINERJA TAHUN 2020

Penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:

| No | Jumlah Nilai            | Kategori         |
|----|-------------------------|------------------|
| 1  | Lebih dari 100%         | Baik Sekali (BS) |
| 2  | Lebih dari 75% s/d 100% | Baik (B)         |
| 3  | 55% s/d 75%             | Cukup (C)        |
| 4  | Kurang dari 55%         | Kurang (K)       |

Secara garis besar pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 9  
Pencapaian Indikator Sasaran

| No     | Kategori         | Sasaran        | Persentase |
|--------|------------------|----------------|------------|
| 1      | Baik Sekali (BS) | 1,2,3,7        | 33,33      |
| 2      | Baik (B)         | 4,5,6,10,11,12 | 50,00      |
| 3      | Cukup (C)        | 8,9            | 16,67      |
| 4      | Kurang (K)       | -              | -          |
| Jumlah |                  | 12             | 100        |

### 3.2 EFISIENSI PROGRAM DAN PENDANAAN TAHUN 2020

Penilaian atas Efisiensi Program dan Pendanaan Tahun 2020 yang telah dianggarkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, digunakan standar pengukuran skala ordinal sebagai berikut:



| No | Jumlah Nilai            | Kategori            |
|----|-------------------------|---------------------|
| 1  | Lebih dari 100%         | Sangat Efisien (SE) |
| 2  | Lebih dari 75% s/d 100% | Efisien (E)         |
| 3  | 55% s/d 75%             | Kurang Efisien (KE) |
| 4  | Kurang dari 55%         | Tidak Efisien (TE)  |

Hasil pengukuran ini diharapkan dapat digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat efisiensi program dan pendanaan guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar efisiensi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan pada tergambar dalam Tabel berikut:

Tabel 10  
Pencapaian Efisiensi Program dan Pendanaan

| No            | Kategori            | Sasaran                    | Persentase |
|---------------|---------------------|----------------------------|------------|
| 1             | Sangat Efisien (SE) | 1,2,3,4,6,5,7,8,9,10,11,12 | 100        |
| 2             | Efisien (E)         | -                          | -          |
| 3             | Kurang Efisien(KE)  | -                          | -          |
| 4             | Tidak Efisien(TE)   | -                          | -          |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>12</b>                  | <b>100</b> |

Dengan demikian secara umum pencapaian sasaran melalui program dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dinilai ***Sangat Efisien (SE)***. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja serta efisiensi program dan pendanaan lebih lanjut akan disajikan dalam sub bab berikut.

### 3.3 ANALISA PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM SERTA PENDANAAN

Analisa capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan alat ukur yaitu indikator-indikator kinerja yang telah dirumuskan dalam Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan analisa dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen untuk meningkatkan kinerja dimasa depan.

Tabel 11  
Rekapitulasi Pengukuran Kinerja  
Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020

| N O | SASARAN                                                 | INDIKATOR                     | SATUAN | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-----|---------------------------------------------------------|-------------------------------|--------|--------|-----------|---------|
| 1   | 2                                                       | 3                             | 4      | 5      | 6         | 7       |
| 1   | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih | Opini BPK                     | -      | WTP    | WTP       | 100     |
|     |                                                         | Nilai Sakip Pemerintah Daerah | -      | B      | B         | 100     |
|     |                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat    | %      | 73     | 78,25     | 107,19  |

| N<br>O | SASARAN                                   | INDIKATOR                                                          | SATUAN      | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------|--------|-----------|---------|
| 1      | 2                                         | 3                                                                  | 4           | 5      | 6         | 7       |
|        |                                           | Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT                | %           | 43,5   | 61,29     | 140,90  |
| 2      | Meningkatnya Penegakan Hukum              | Angka Kriminalitas                                                 | /10.000     | 20,00  | 7,18      | 164,09  |
| 3      | Terwujudnya Penanganan Bencana            | Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam     | %           | 84,50  | 100       | 100     |
| 4      | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat  | Angka Kematian Bayi                                                | /1.000 KH   | 8,75   | 7,20      | 117,71  |
|        |                                           | Angka Kematian Ibu                                                 | /100.000 KH | 150    | 110,74    | 126,17  |
|        |                                           | Persentase Balita Kurang Gizi                                      | %           | 2,50   | 4,32      | 27,20   |
|        |                                           | Usia Harapan Hidup                                                 | Tahun       | 69,50  | 69,56     | 100,09  |
|        |                                           | Indeks Pembangunan Manusia                                         | %           | 68,25  | 67,50     | 98,90   |
| 5      | Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan | Angka Melek Huruf                                                  | %           | 99,25  | 99,16     | 99,91   |
|        |                                           | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                                       | %           | 8,98   | 8,51      | 94,77   |
|        |                                           | Angka Melanjutkan Sekolah: SD/MI ke SMP/MTs                        | %           | 95,75  | 88,46     | 92,38   |
|        |                                           | Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah                | %           | 75,25  | 76,50     | 101,66  |
|        |                                           | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                               | %           | 74,50  | 75,91     | 101,89  |
| 6      | Meningkatnya Infrastruktur Dasar          | Persentase jumlah Penduduk yang mendapatkan Akses Air Bersih       | %           | 78,50  | 78,60     | 100,13  |
|        |                                           | Rasio Jaringan Irigasi                                             | M/HA        | 15,50  | 12,55     | 80,97   |
|        |                                           | Drainase Dalam Kondisi Baik/ Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | KM          | 30,50  | 29,57     | 96,95   |
|        |                                           | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik                 | %           | 83,25  | 85,49     | 102,69  |
| 7      | Meningkatnya Akseibilitas Transportasi    | Rasio Ketersediaan Jembatan                                        | %           | 79     | 78,79     | 99,73   |
|        |                                           | Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas                          | Kasus       | 50     | 35        | 130     |

| N<br>O | SASARAN                                                                                                                                          | INDIKATOR                                            | SATUAN    | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------|---------|
| 1      | 2                                                                                                                                                | 3                                                    | 4         | 5      | 6         | 7       |
| 8      | Terwujudnya Kesenjangan Gender                                                                                                                   | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                 | %         | 73     | 42,06     | 57,62   |
| 9      | Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB | %         | 20,10  | 12,94     | 67      |
|        |                                                                                                                                                  | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB            | %         | 5      | 3,98      | 88      |
|        |                                                                                                                                                  | Produktifitas Padi dan Jagung (Ton)                  | Ton/HA    | 13,20  | 12,95     | 98,11   |
|        |                                                                                                                                                  | Kunjungan Wisata                                     | Wisatawan | 65.200 | 31.972    | 49,19   |
|        |                                                                                                                                                  | Produksi Perikanan (Ton)                             | Ton       | 33.750 | 23.364    | 69,22   |
| 10     | Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM                                                          | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)         | Investor  | 390    | 256       | 65,64   |
|        |                                                                                                                                                  | Pertumbuhan Industri                                 | %         | 18,00  | 6,79      | 37,72   |
|        |                                                                                                                                                  | Usaha Mikro dan Kecil                                | %         | 50     | 64,40     | 128,8   |
| 11     | Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang                                                                                         | Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan           | Bangunan  | 0,06   | 0,05      | 83,33   |
|        |                                                                                                                                                  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)              | %         | 79,50  | 83,86     | 105,48  |
| 12     | Menurunnya Angka Kemiskinan                                                                                                                      | Angka Kemiskinan                                     | %         | 3,91   | 4,45      | 86,19   |
|        |                                                                                                                                                  | Rasio Ketergantungan                                 | %         | 43,10  | 42,78     | 100,74  |
|        |                                                                                                                                                  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                   | %         | 84,50  | 47,53     | 56,25   |
|        |                                                                                                                                                  | Indeks Gini                                          | -         | 0,25   | 0,28      | 88,00   |
|        |                                                                                                                                                  | Laju Inflasi                                         | -         | 3,51   | -         | -       |

Capaian kinerja ini disusun berdasarkan penjabaran sasaran yang menunjang pencapaian masing-masing misi dengan uraian sebagai berikut:

#### Sasaran Strategis 1 :

##### Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 (empat) indikator yang diusung oleh seluruh Perangkat Daerah dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **112,02%**.



**Tabel 12**  
**Sasaran Strategis 1**

| No               | Indikator                                           | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |               | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|---------------|--------------|-------------|----------------------|
|                  |                                                     |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian     | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1.               | Opini BPK                                           | WTP            | WTP            | WTP    | WTP       | 100       | WTP    | WTP       | 100           | -            | -           | WTP                  |
| 2.               | Nilai SAKIP Pemerintah Daerah                       | CC (52,09)     | B (60,02)      | B      | B (60,52) | 100       | B      | B (60,77) | 100           | -            | -           | BB                   |
| 3.               | Indeks Kepuasan Masyarakat                          | -              | -              | 71,00  | 81,68     | 115,04    | 73     | 78,25     | 107,19        | -7,85        | -3,43       | 75                   |
| 4.               | Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT | -              | -              | 44,90  | 54        | 120,27    | 43,5   | 61,29     | 140,90        | 20,63        | 7,29        | 77,55                |
| <b>Rata-Rata</b> |                                                     |                |                |        |           |           |        |           | <b>112,02</b> |              |             |                      |

**a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**

**1. Opini BPK**

Indikator peningkatan opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) digunakan untuk mengukur ketepatan penyajian LKPD. Tahun 2017 s/d Tahun 2019 BPK RI memberikan prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap LKPD Kabupaten Halmahera Utara, ini berarti selama 3 (dua) tahun berturut-turut Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas LKPD se-Provinsi Maluku Utara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara, pada tahun 2020 Kabupaten Halmahera Utara bersama dengan 7 Kabupaten/Kota dan Pemerintah Provinsi Maluku Utara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan demikian dari tahun 2017 s/d tahun 2020 atau selama 4 (empat) tahun berturut-turut hasil LKPD Kabupaten Halmahera Utara mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Upaya yang dilakukan adalah membangun komitmen bersama dengan seluruh perangkat daerah dalam menyajikan informasi dan kewajiban pada laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintah, efektivitas penilaian internal, kecukupan menyajikan data/informasi dan kepatutan terhadap peraturan perundang-undangan.

Secara teknis didukung dengan menggunakan aplikasi Sistem Manajemen Daerah (SIMDA) dan dilakukan rekonsiliasi keuangan maupun aset secara berskala antara Badan Keuangan Aset Daerah dengan Perangkat Daerah.

**2. Nilai SAKIP Pemerintah Daerah**

Hasil penilaian atas Nilai SAKIP Pemerintah Daerah, implementasi penilaiannya dengan memperhatikan kaidah-kaidah proses penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, pelaporan maupun evaluasi kinerja.

Jika dilihat dari tahun 2017 s/d 2019 selama 3 (tiga) tahun Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara mendapat nilai CC (52,09), sedangkan capaian hasil pada tahun 2018 adalah B (60,02) dan tahun 2019 mendapat nilai B (60,52). Berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara kembali mendapat nilai B (60,77). Hasil ini dapat dilihat bahwa Nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2018 s/d tahun 2020 selama 3 (tiga) tahun berturut-turut mendapat nilai B dengan rata-rata nilai sebesar 60,44%.

Bisa dikatakan bahwa dari tahun 2017 s/d tahun 2020 nilai SAKIP Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah baik karena hasil realisasinya mencapai target, walaupun kenaikan nilainya tidak terlalu signifikan tetapi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara tetap berkomitmen untuk menjaga implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui upaya sebagai berikut:

1. Menjaga keselarasan dokumen perencanaan daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah,
2. Membuat laporan pertanggungjawaban kinerja yang akuntabel dan tepat waktu,
3. Memastikan adanya ketersediaan alokasi anggaran untuk menunjang indikator kinerja utama yang ditetapkan.

### **3. Indeks Kepuasan Masyarakat**

Penilaian Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan upaya untuk memotret apa adanya standar pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pelayanan publik, hasil ini disurvei dan dipublikasikan secara nasional. Tingkat kepatuhan standar layanan dibagi ke dalam 3 kategori/zona yaitu:

1. Zona Hijau, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang tinggi atas standar pelayanan publik.
2. Zona Kuning, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang sedang atas standar pelayanan publik
3. Zona Merah, dimana penyelenggara pelayanan publik dinilai telah memiliki kepatuhan yang rendah atas standar pelayanan publik.

Kabupaten Halmahera Utara melalui hasil survey berada pada kategori/zona kuning dengan persentase 81,68% dari target 71,00%. Tahun 2020 target yang ditetapkan 73,00%, sedangkan hasil yang dicapai adalah 78,25%. Jika dibandingkan capaian tahun 2020 dan tahun 2019 terdapat penurunan persentase sebesar -7,85%, sedangkan perbandingan realisasi adalah -3,43%, ini disebabkan karena adanya Pandemi COVID-19 dengan diterapkannya pembatasan sosial berskala besar yang mengakibatkan tidak terlaksananya pelayanan publik kepada masyarakat secara maksimal.

### **4. Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT**

Tahun 2019 hasil data survey yang sampaikan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan

Persandian terhadap perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT adalah 54,00% dari yang ditargetkan 44,90%. Penggunaan aplikasi berbasis IT ini terdiri dari aplikasi yang disediakan oleh pemerintah pusat melalui kementerian/lembaga maupun aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah baik aplikasi berbasis sistem informasi ataupun secara administrasi. Pada tahun 2020 persentase perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT adalah 61,29% dari yang ditargetkan 43,50%. Jika dibandingkan capaian dengan tahun 2020 dan 2019 maka terdapat peningkatan sebesar 20,63% dan realisasi penggunaan aplikasi berbasis IT dengan capaian 7,29%.

Dari capaian ini dapat disimpulkan sangat baik karena adanya peningkatan perangkat daerah yang menggunakan aplikasi berbasis IT. Itu karena pada era saat ini peranan teknologi informasi sangat penting dan dibutuhkan untuk mempermudah dalam berkomunikasi, memberikan pengetahuan manajemen data bahkan pelayanan administrasi dan pelayanan publik kepada masyarakat.

**b. Analisis Program dan Pendanaan**

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
2. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
3. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
4. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 16.759.248.886 dan terealisasi sebesar Rp. 12.272.525.494 atau persentase sebesar 73,23%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 112,02% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 73,23% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 152,97%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

**Sasaran Strategis 2 :**

**Meningkatnya Penegakan Hukum**

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diusung oleh 2 Perangkat Daerah yaitu Dinas Satpol PP dan Badan Kesbangpol Kabupaten Halmahera Utara dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai **164,09%**.

Tabel 13  
Sasaran Strategis 2

| No | Indikator          | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|----|--------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                    |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1  | Angka Kriminalitas | 5,60           | 5,46           | 5,00   | 25,31     | - 306,2   | 20,00  | 7,18      | 164,09    | 470,29       | - 18,13     | 2,5                  |

**a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**

Angka kriminalitas merupakan indikator pengukur tingkat keamanan di suatu daerah yang diukur melalui jumlah kasus kejahatan yang terjadi dalam setahun dibagi jumlah penduduk dan dikalikan 10.000. Pada Tahun 2020 masih terdapat kasus yang sama dengan tahun 2019, dengan jumlah kasus kejahatan yang dilaporkan ke kepolisian sebanyak 144 kasus, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 14  
Angka Kriminalitas

| No       | Jenis Kejahatan            | Jumlah Kasus 2019 | Jumlah Kasus 2020 | Selisih |
|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|---------|
| 1        | 2                          | 3                 | 4                 | 5       |
| <b>a</b> | <b>Terhadap Manusia</b>    |                   |                   |         |
|          | Pembunuhan                 | 0                 | 1                 | 1       |
|          | Percobaan Pembunuhan       | 1                 | 0                 | -1      |
|          | Keroyok                    | 39                | 14                | -25     |
|          | Keroyok Luka Berat         | 1                 | 0                 | -1      |
|          | Aniaya Biasa               | 104               | 38                | -66     |
|          | Aniaya Luka Berat          | 3                 | 0                 | -3      |
|          | Pengancaman                | 5                 | 2                 | -3      |
|          | Curas                      | 17                | 0                 | -17     |
|          | Pemeriksaan                | 5                 | 0                 | -5      |
|          | Percabulan                 | 3                 | 0                 | -3      |
|          | KDRT Luka Fisik Biasa      | 19                | 2                 | -17     |
|          | Perzinaan                  | 15                | 5                 | -10     |
|          | Bawa lari gadis            | 9                 | 0                 | -9      |
|          | Pencabulan terhadap anak   | 7                 | 3                 | -4      |
|          | Persetubuhan terhadap anak | 37                | 21                | -16     |
|          | Kekerasan terhadap anak    | 6                 | 2                 | -4      |
|          | Perdagangan Anak           | 1                 | 0                 | -1      |
|          | Penelantaran keluarga      | 15                | 2                 | -13     |
|          | Aborsi                     | 1                 | 0                 | -1      |
|          | Penemuan Mayat             | 3                 | 0                 | -3      |
|          | Penghinaan/Fitnah          | 1                 | 0                 | -1      |
|          | Pencemaran Nama Baik       | 13                | 3                 | -10     |

| No                      | Jenis Kejahatan                          | Jumlah Kasus<br>2019 | Jumlah Kasus<br>2020 | Selisih     |
|-------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| 1                       | 2                                        | 3                    | 4                    | 5           |
|                         | Perdagangan Manusia                      | 1                    | 0                    | -1          |
|                         | Narkotika                                | 8                    | 0                    | -8          |
| <b>B</b>                | <b>Terhadap Harta Benda</b>              |                      |                      | 0           |
|                         | Penipuan                                 | 27                   | 2                    | -25         |
|                         | Penggelapan                              | 17                   | 0                    | -17         |
|                         | Curisa                                   | 52                   | 3                    | -49         |
|                         | Curat (curi pemberatan)                  | 28                   | 11                   | -17         |
|                         | Curanmor                                 | 19                   | 3                    | -16         |
|                         | Penadahan                                | 1                    | 1                    | 0           |
|                         | Kebakaran/Pembakaran                     | 10                   | 0                    | -10         |
|                         | Penyerobotan Tanah/Lahan                 | 1                    | 0                    | -1          |
|                         | Masuk Pekarangan tanpa ijin              | 0                    | 1                    | 1           |
|                         | Palsu Surat/Surat Palsu                  | 3                    | 5                    | 2           |
|                         | Pengrusakan                              | 5                    | 0                    | -5          |
| <b>C</b>                | <b>Terhadap Masyarakat</b>               |                      |                      | 0           |
|                         | Ketertiban Umum                          | 1                    | 0                    | -1          |
|                         | Perjudian                                | 6                    | 5                    | -1          |
| <b>2</b>                | <b>Kejahatan Transnasional;</b>          |                      |                      | 0           |
|                         | Llct Trade (Niaga Senpi)                 | 1                    | 1                    | 0           |
|                         | Ilegal Minning                           | 0                    | 2                    | 2           |
|                         | Ilegal Oil/BBM                           | 1                    | 0                    | -1          |
|                         | Perbankan                                | 1                    | 3                    | 2           |
|                         | Senjata Api                              | 2                    | 1                    | -1          |
|                         | Penyiaran                                | 1                    | 0                    | -1          |
|                         | ITE                                      | 4                    | 7                    | 3           |
|                         | Korupsi                                  | 1                    | 3                    | 2           |
|                         | Satwa Ilegal                             | 1                    | 0                    | -1          |
| <b>3</b>                | <b>Kejahatan Berimplikasi Kontijensi</b> |                      |                      | 0           |
|                         | Pemilu                                   | 10                   | 3                    | -7          |
| <b>JUMLAH KEJAHATAN</b> |                                          | <b>506</b>           | <b>144</b>           | <b>-362</b> |

Sumber data kriminalitas Satuan Reskrim Polres Halut Tahun 2019 dan 2020 dan Polsek 2020

Jumlah penduduk Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 sebanyak 200.491 jiwa (*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Utara*), Berdasarkan data tersebut diketahui angka kriminalitas Halmahera Utara mencapai 7,18 per 10.000 penduduk, dibandingkan dengan tahun 2019 angka kriminalitas mengalami penurunan yang cukup signifikan, Jumlah kasus pada tahun 2019 sebanyak 506 kasus dengan Angka Kriminalitas 25,31. Di tahun 2020 Jumlah kasus berkurang 362 kasus, dengan pengurangan Angka Kriminalitas -18,13. Penurunan terbesar pada kasus aniaya biasa, berkurang 66 kasus. Tiga kasus dengan Intensitas kejadian tertinggi pada tahun 2020 yaitu Kasus Aniaya Biasa 38 kasus, Persetubuhan Terhadap Anak 21 kasus dan Keroyok 14 kasus.

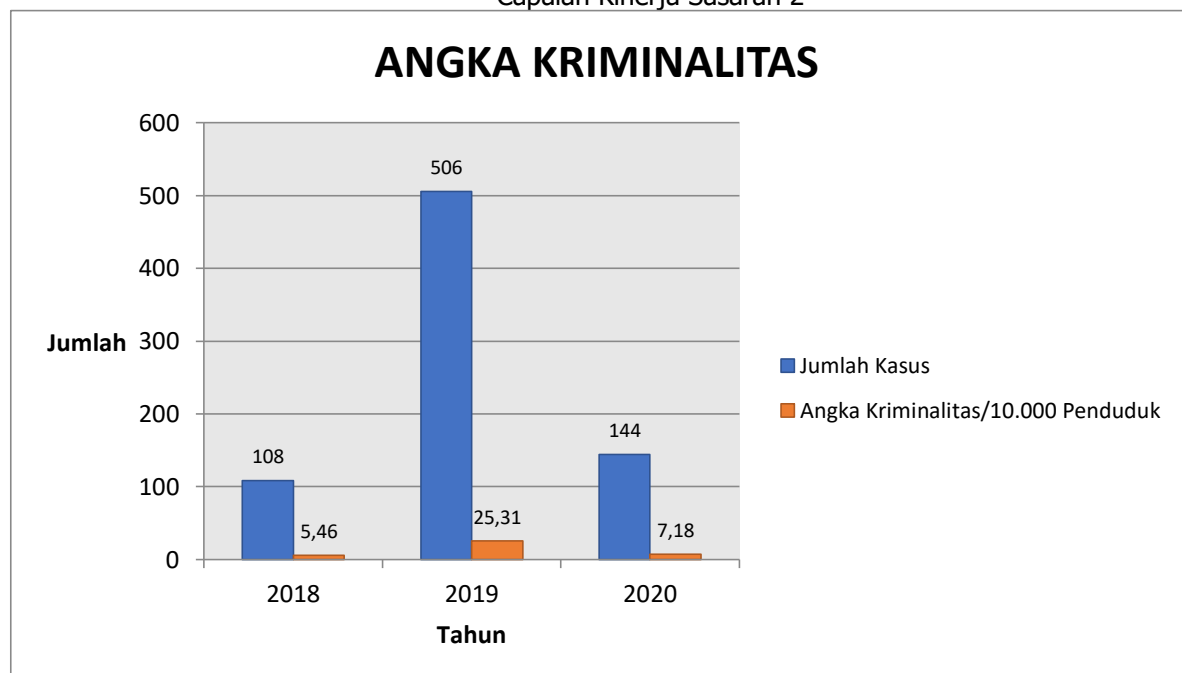
Target jangka menengah yang ditetapkan 2,5 maka terdapat selisih dengan angka kriminalitas tahun 2020 yaitu 4,68. Dibandingkan dengan target yang ditetapkan yaitu 20,00 maka capaian kinerja Baik sekali dengan persentase 164,09%.

Keberhasilan capaian ini ditunjang dengan strategi melibatkan masyarakat dalam menekan angka kriminalitas yang ditempuh melalui 2 cara yaitu:

1. Pembentukan Komite intelegent desa yang anggotanya diambil dari masyarakat setempat kemudian dilatih oleh TNI dan Polri.
2. Memberikan penyuluhan kepada anak remaja tentang narkoba dan tindak kriminal lainnya.

Dalam upaya menekan angka kriminalitas, tahun 2021 akan dilakukan upaya/strategi yang sama dengan tahun 2020

Grafik 1  
Capaian Kinerja Sasaran 2



#### b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan penegakan hukum didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan;
2. Program pendidikan politik masyarakat;
3. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal;
4. Program pengembangan wawasan kebangsaan;
5. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat);
6. Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 1.755.565.540 dan terealisasi sebesar Rp. 1.152.327.334 atau persentase sebesar 65,64%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 164,09% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 65,64% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 249,98%. Dengan persentase

tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

### Sasaran Strategis 3:

#### Terwujudnya Penanganan Bencana

Sasaran strategis ini diukur dengan 1 (satu) indikator yang diurus oleh 1 Perangkat Daerah yaitu Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai **118,35%**.

Tabel 15  
Sasaran Strategis 3

| No | Indikator                                                     | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|----|---------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                                                               |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1. | Presentase Kejadian Bencana yang ditangani kurang dari 24 jam | -              | -              | 83,33  | 100       | 120       | 84,50  | 100       | 118,35    | -1,66        | 0           | 100                  |

#### a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

Pada Tahun 2020 terjadi bencana alam pada 14 titik dengan jenis bencana yaitu banjir pada 7 titik, gelombang air pasang/cuaca ekstrim pada 2 titik, angin puting beliung pada 1 titik, longsor pada 1 titik, kebakaran pada 3 titik dan bencana non alam pada 1 titik yaitu bencana sosial, atas peristiwa tersebut telah dilakukan penanganan seluruhnya dengan respon time kurang dari 24 jam (100%).

Dibandingkan dengan Tahun 2019 ditargetkan sebesar 83,33% dengan capaian 120% maka hasil pencapaian terjadi penurunan sebesar 1,66%, adapun faktor pendukung kejadian bencana yang ditangani kurang dari 24 jam dengan presentase 100% pada Tahun 2020 karena adanya kerjasama yang baik secara internal pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Halmahera Utara serta dengan pihak ketiga dalam hal ini pelaku usaha yang berada di wilayah Kabupaten Halmahera Utara.

#### b. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Penanganan bencana didukung dengan **Program Penanganan Darurat**.

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 1.048.290.000 dan terealisasi sebesar Rp.678.442.000 atau persentase sebesar 64,72%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 118,35% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 64,72% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 182,85%. Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.



## Sasaran Strategis 4 :

### Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran strategis ini diukur dari 5 (lima) indikator yang diukung oleh 3 (tiga) Perangkat Daerah yaitu Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB dengan Kategori Capaian **Baik** dengan nilai capaian rata-rata **94,02%**.

Tabel 16  
Sasaran Strategis 4

| No        | Indikator                     | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|-----------|-------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|           |                               |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1         | Angka Kematian Bayi           | 12,23          | 11             | 11     | 6         | 145,45    | 8,75   | 7,20      | 117,71    | 27,74        | 1,20        | 10,07                |
| 2         | Angka Kematian Ibu            | 388,00         | 162            | 162    | 53        | 146       | 150    | 110,74    | 126,17    | 19,83        | 57,74       | 150                  |
| 3         | Persentase Balita Kurang Gizi | 5,30           | 2,66           | 2,65   | 2,19      | 117,67    | 2,50   | 4,32      | 27,20     | 90,47        | 2,13        | 5,10                 |
| 4         | Angka Usia Harapan Hidup      | 68,86          | 68,94          | 68,94  | 69,47     | 100,77    | 69,50  | 69,56     | 100,09    | -0,68        | 0,09        | 70,80                |
| 5         | Indeks Pembangunan Manusia    | 66,02          | 67,30          | 66,70  | 67,75     | 101,57    | 68,25  | 67,50     | 98,90     | -2,67        | -0,25       | 71,00                |
| Rara-rata |                               |                |                |        |           |           | 94,02  |           |           |              |             |                      |

#### a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

##### 1. Angka Kematian Bayi

Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator penting untuk menentukan tingkat kesehatan masyarakat. Indikator Angka Kematian Bayi digunakan untuk menghitung Jumlah bayi yang meninggal pada usia 1-12 bulan per 1000 Kelahiran hidup dalam 1 tahun. Pada tahun 2020 jumlah bayi yang meninggal sebanyak 26 bayi dari 3.612 bayi lahir hidup atau 7 bayi per 1.000 Kelahiran Hidup. Jika Dibandingkan di tahun 2019 bayi yang meninggal berjumlah 23 bayi dari 3.777 bayi lahir hidup, atau 6 / 1000 Kelahiran Hidup. Berdasarkan data tersebut diketahui jumlah bayi meninggal di tahun 2020 bertambah 3 orang dengan Angka Kematian Bayi meningkat 1/1000 (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*).

Target jangka Menengah yang ditetapkan 10,07 maka capaian tahun 2020 menunjukan bahwa Pemerintah Daerah sudah melampaui/berada pada kinerja yang lebih baik dari target menengah yang ditetapkan. Jika, disandingkan dengan target Nasional yaitu 16/1000 Kelahiran Hidup (*Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024*) maka capaian Halmahera Utara lebih baik dari target Nasional.

Penyebab kematian Bayi yaitu BBLR (Berat Badan Lahir Rendah), Asfiksia, Tetanus Neonartum, Sepsis, Kelainan Bawaan dan Pneumonia. Dalam upaya untuk menekan Angka Kematian Bayi dan meningkatkan angka kelangsungan hidup maka pada tahun 2021 Halmahera Utara penambahan alat kesehatan, penambahan kuota bidan TKD sebanyak 57 orang serta mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

## **2. Angka Kematian Ibu**

Angka Kematian Ibu adalah jumlah kematian ibu selama masa kehamilan, persalinan dan nifas. Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) dihitung berdasarkan jumlah seluruh kematian selama periode 1 tahun (Januari s/d Desember) per 100.000 Kelahiran hidup di wilayah Halmahera Utara. Pada tahun 2020 jumlah kematian ibu sebanyak 4 Orang dari total 3.612 ibu melahirkan atau 110,74/100.000 kelahiran hidup. Dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah ibu yang meninggal bertambah 2 orang (dari 2 ibu menjadi 4 ibu.) Pada tahun 2019 angka kematian ibu sebesar 53 /100.000 Kelahiran Hidup atau ditemukan 2 Ibu yang meninggal dari 3.777 kelahiran hidup. Angka kematian ibu sejak 2016 sampai 2020 mencapai angka terendah pada tahun 2019 yaitu 53/100.000 kelahiran hidup dan tertinggi pada tahun 2017 yaitu 388/100.000 kelahiran hidup (*Sumber Dinas Kesehatan Kabupaten Halmahera Utara*). Jika dibandingkan dengan Target Nasional yaitu 183/100.000 Kelahiran Hidup (*Renstra Kementerian Kesehatan RI 2020-2024*) maka Kabupaten Halmahera Utara masih berada di bawah target yang telah ditetapkan. Penyebab kematian ibu antara lain pendarahan post partum, Hipertensi dalam kehamilan serta infeksi. Dalam upaya untuk menekan jumlah Angka Kematian Ibu, akan ditingkatkan cakupan pertolongan persalinan, penambahan alat kesehatan, penambahan kuota bidan TKD sebanyak 57 orang serta mengoptimalkan pelaksanaan program jaminan Persalinan (JAMPERSAL).

## **3. Persentase Balita Kurang Gizi**

Persentase Balita Kurang Gizi merupakan persentase Jumlah balita (0-5 tahun) yang ditemukan kondisi kurang Gizi dari keseluruhan Jumlah balita di suatu wilayah dan tahun yang sama.

Jumlah Balita di kabupaten Halmahera Utara Pada tahun 2020 sebanyak 16.810 selanjutnya dilakukan pengukuran 8.130 dan teridentifikasi balita dengan kondisi kurang gizi sebanyak 726 balita atau 4,31 % dari jumlah total balita dan 8,92 % dari balita yang diukur secara sampling. Dibandingkan dengan tahun 2019 jumlah balita kurang gizi 380 balita dari 17.342 total balita, jika dipersentasikan sebesar 2,19 % dan 8,42 % dari balita yang diukur 4.513. Angka balita kurang gizi mengalami Peningkatan 2,13 % dari tahun sebelumnya. Realisasi tahun 2020 sebesar 4,31 dibandingkan dengan target Jangka Menengah 5,10 maka dapat disimpulkan kinerja Pemerintah Daerah tahun 2020 sudah lebih baik dari target jangka menengah.

Jumlah balita kurang gizi tahun 2020 tercatat mengalami peningkatan karena Puskesmas melakukan pelacakan ke rumah-rumah untuk balita yang tidak datang ke Posyandu dan pola asuh/pola makan yang salah dari keluarga. Diharapkan pada tahun 2021 lebih meningkatkan kegiatan sosialisasi mengenai pola asuh yang baik dan benar kepada bayi dan balita, juga

pemberian makanan tambahan serta melakukan intervensi selama 90 hari kepada bayi balita yang kekurangan gizi.

#### **4. Usia Harapan Hidup**

Indikator Usia Harapan Hidup digunakan untuk mengukur lama hidup manusia didunia. Usia Harapan Hidup pada Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 yaitu 69,56 tahun, meningkat 0,09 dari tahun 2019 yaitu 69,47 tahun.

Usia harapan hidup pada Kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah dari rata-rata capaian nasional yaitu 71,47 tahun namun lebih tinggi diatas rata-rata usia harapan hidup pada Provinsi Maluku Utara yaitu 68,33 tahun dan berada pada urutan ke 2 di bawah Kota Ternate yaitu 70,97 tahun. (Sumber Data [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)). Dibandingkan dengan Jangka Menengah yaitu 70,80 masih terdapat selisih 1,24 tahun.

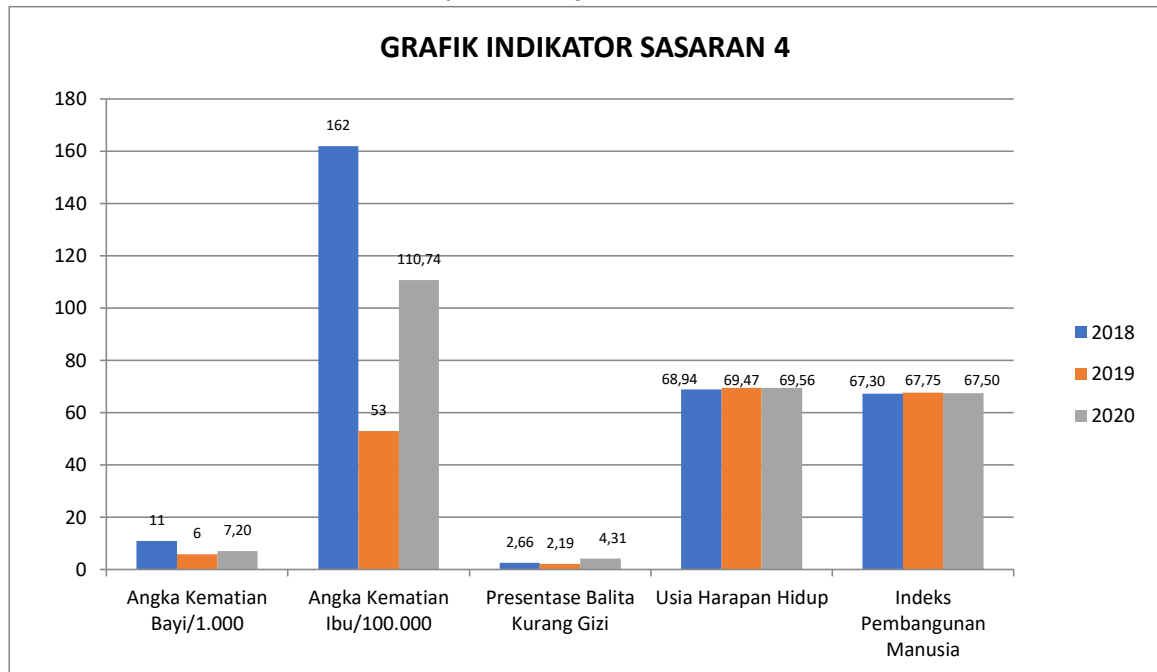
Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya maka diketahui Usia Harapan Hidup Kabupaten Halmahera Utara semakin meningkat, karena akses dan kualitas pelayanan kesehatan di kabupaten Halmahera Utara semakin meningkat. Yang dimaksud dengan akses yaitu semakin banyak fasilitas kesehatan yang tersedia sehingga memudahkan untuk mengakses fasilitas kesehatan dan peningkatan kualitas pelayanan disebabkan semakin banyak para medis dan sarana prasarana kesehatan sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan.

#### **5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDR) IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar yaitu Umur panjang dan hidup sehat, tingkat pengetahuan dan standar hidup layak. Indikator IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan Pemerintah Daerah dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk) selain itu IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.

IPM Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 yaitu 67,50 menurun -0,25 dari tahun 2019 yaitu 67,75. Dari tahun 2017 sampai tahun 2019 angka IPM mengalami kenaikan sedangkan tahun 2020 terjadi penurunan disebabkan Halmahera Utara juga terseret guncangan ekonomi nasional karena imbas dari pandemik virus Covid 19 yang melanda Negara Indonesia. IPM Kabupaten Halmahera Utara masih berada dibawah angka rata-rata IPM Provinsi Maluku Utara yaitu 68,49 dan menempati posisi ketiga se-provinsi Maluku Utara. Posisi pertama ditempati oleh Kota Ternate dengan IPM sebesar 79,82 dan posisi kedua ditempati Kota Tidore Kepulauan dengan IPM 70,53. Berdasarkan data dari website resmi BPS [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id). IPM Kabupaten Halmahera Utara juga masih dibawah IPM Nasional yaitu 71,94.

Grafik 1  
Capaian Kinerja Sasaran 4



**b. Analisis Program dan Pendanaan**

Upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dalam mewujudkan Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2020 melalui program-program yang melekat pada Dinas Kesehatan, RSUD, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, antara lain :

1. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan;
2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Pengawasan Obat dan Makanan;
4. Program Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
5. Program Pengembangan Lingkungan Sehat;
6. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular;
7. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan;
8. Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya Program Sumber Daya Manusia Kesehatan;
9. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak;
10. Program Peningkatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
11. Program Sumber Daya Manusia Kesehatan;
12. Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
13. Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata;
14. Program Keluarga Berencana;
15. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
16. Program pelayanan kontrasepsi;

17. Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan;
18. Program pengembangan model operasional BKB-Posyandu-PADU.

Pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 151.366.036.163,00 terealisasi sebesar Rp. 103.814.490.145,23 atau 68,59 %. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 94,02 % dengan presentase realisasi anggaran sebesar 68,59 % perolehan nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 137,08 % Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja pada Indikator ini **Sangat Efisien**.

#### Sasaran Strategis 5 :

#### Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan

Sasaran strategis ini diukur dengan 4 indikator yang diusung oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan. Hasil pengukuran menunjukkan 4 indikator memiliki capaian kinerja **Baik** dengan persentase **97,18%**.

Tabel 17  
Sasaran Strategis 5

| No        | Indikator                                            | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|-----------|------------------------------------------------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|           |                                                      |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1.        | Angka Melek Huruf                                    | 97,20          | 97,50  | 98,80     | 101,33    | 99,25  | 99,16     | 99,91     | -1,42        | 0,36        | 99,75                |
| 2.        | Angka rata-rata lama sekolah                         | 8,44           | 8,96   | -         | -         | 8,98   | 8,51      | 94,77     | 94,77        | 8,51        | 9,00                 |
| 3.        | Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS           | 99,63          | 99,95  | 85,18     | 85,22     | 95,75  | 88,46     | 92,38     | 7,16         | 3,28        | 99,7                 |
| 4.        | Rasio Ketersediaan Sekolah per penduduk Usia Sekolah | -              | -      | -         | -         | 75,25  | 76,50     | 101,66    | 101,66       | 76,50       | 86,51                |
| Rata-Rata |                                                      |                |        |           |           |        |           | 97,18     |              |             |                      |

#### a. Deskripsi sasaran dan capaian Kinerja Sasaran

##### 1. Angka Melek Huruf

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemajuan pendidikan di wilayah Kabupaten Halmahera Utara, dengan melakukan pengukuran atas proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang bisa membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.

Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas sebanyak 150.347 jiwa, yang bisa membaca dan menulis sebanyak 149.084 jiwa, dengan demikian angka melek huruf Kabupaten Halmahera Utara mencapai 99,16% berada di atas target yang telah ditetapkan.

Dibandingkan dengan capaian tahun 2019 jumlah penduduk yang bisa membaca dan menulis usia 15 tahun ke atas sebanyak 142.419 jiwa dari total 144.156 jiwa atau 98,80%, maka disimpulkan pada tahun 2020 jumlah penduduk yang bias membaca dan menulis mengalami peningkatan sebanyak 6.665 jiwa atau sebesar 4,47%.

Target jangka menengah pemerintah Kabupaten Halmahera Utara yaitu 99,75% masih terdapat selisih 0,59% karena itu dibutuhkan kerja keras untuk mencapai target jangka menengah tersebut. Sebagai solusinya pemerintah Kabupaten Halmahera Utara akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 50 tahun dan difabel, melalui peningkatan jumlah PKBM (pusat kegiatan belajar masyarakat) di wilayah yang memiliki angka buta huruf tinggi;
- Merubah pola pikir masyarakat tentang pentingnya pendidikan salah satunya melalui kegiatan sosialisasi tentang pentingnya pendidikan ke masyarakat;
- Melakukan upaya pencegahan penambahan angka buta huruf melalui penyediaan bantuan operasional untuk PAUD dan meningkatkan rasio ketersediaan sekolah maupun guru pada jenjang pendidikan dasar melalui pembangunan infrastruktur;
- Meningkatkan minat baca masyarakat melalui kegiatan Gemar Membaca.

## **2. Angka rata-rata lama sekolah**

Indikator ini digunakan untuk mengukur Rata-rata lama sekolah (RLS)/ Mean years of schooling (MYS) pada Kabupaten Halmahera Utara. Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan penduduk usia 25 tahun ke atas dengan asumsi pada umur 25 tahun proses pendidikan sudah berakhir. Perhitungan rata-rata lama sekolah pada usia 25 tahun keatas juga mengikuti standar internasional yang digunakan oleh UNDP.

Dalam perhitungan rata-rata lama sekolah, penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Pada tahun 2020 angka rata-rata lama sekolah adalah 8,51% dari target yang ditetapkan sebesar 8,98% dengan demikian capaian kinerjanya 94,77%.

Dibandingkan dengan angka RLS tingkat propinsi tahun 2020 yaitu 9,04% (<https://malut.bps.go.id/indicator/26/262/1/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html>) maka capaian kabupaten Halmahera Utara masih lebih rendah dibawah capaian tingkat propinsi (<https://malut.bps.go.id/indicator/26/262/1/rata-rata-lama-sekolah-menurut-kabupaten-kota-tahun-.html>).

Sebagai solusinya pemerintah daerah akan melakukan upaya perbaikan dengan cara:

- Meningkatkan pendidikan non formal kepada penduduk yang berusia 45 tahun ke atas;
- Meningkatkan kuantitas dan kualitas guru serta sekolah pada daerah-daerah yang terpencil;





- Menambah jumlah ketersediaan sekolah khususnya pada daerah yang masih membutuhkan.

### **3. Angka Melanjutkan sekolah SD/MI ke SMP/MTS**

Angka melanjutkan dihitung berdasarkan perbandingan antara siswa baru pada jenjang SMP/MTS dengan jumlah siswa yang lulus pada jenjang pendidikan SD di tahun yang sama.

Jumlah siswa baru pada jenjang SMP/Mts pada tahun ajaran 2020/2021 sebanyak 4.048 orang yang tersebar pada 65 Sekolah di 17 kecamatan (34 sekolah Negeri dan 31 sekolah swasta). Jumlah siswa SD yang lulus tahun ajaran 2019/2020 sebanyak 4.576 siswa yang tersebar pada 207 sekolah di kabupaten Halmahera Utara (140 sekolah negeri dan 67 sekolah swasta), maka angka melanjutkan mencapai 88,46% atau masih terdapat 528 siswa (11,09%) yang tidak melanjutkan pendidikan.

Dibandingkan dengan tahun ajaran 2018/2019, dimana angka melanjutkan dari SD ke SMP mencapai 99,95% maka terjadi penurunan angka melanjutkan dari SD ke SMP sebesar 3,28%.

Hal ini disebabkan karena beberapa hal, antara lain, orangtua tidak memiliki cukup biaya untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga solusi kedepannya adalah pemerintah mengupayakan pemenuhan biaya sekolah melalui program Beasiswa maupun program Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

### **4. Rasio Ketersediaan Sekolah per penduduk Usia Sekolah**

Indikator Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan per 10.000 jumlah penduduk per usia pendidikan. Indikator ini merupakan indikator yang baru diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Ratio ketersediaan sekolah dihitung dengan rumus  $(\text{Jumlah Sekolah per Jumlah Penduduk usia Pendidikan}) \times 10.000$ . Rasio ketersediaan sekolah yang diukur adalah Ratio ketersediaan SD/Mi+SMP/Mts.

Jumlah sekolah (SD/Mi+SMP/Mts) pada Tahun 2020 adalah sebanyak 318 sekolah, sedangkan jumlah penduduk usia pendidikan (Usia 7-15 tahun) adalah sebanyak 35.503 orang. Dengan demikian, rasio ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah adalah pada Tahun 2020 adalah sebesar 76,50%.

Jika dibandingkan dengan target RPJMD Tahun 2021 sebesar 86,51% maka rasio ketersediaan sekolah telah melebihi target RPJMD sebesar 20,80%.

#### **b. Analisis Program Dan Pendanaan**

Adapun upaya Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk meningkatkan angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka melanjutkan sekolah serta ketersediaan sekolah tahun 2020 melalui program-program yang dianggarkan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, terdiri dari :

1. Program Pendidikan Anak Usia Dini;



2. Program Pendidikan non Formal;
3. Program Pendidikan Luar Biasa (PLB);
4. Program Peningkatan mutu pendidikan dan tenaga Kependidikan;
5. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.
6. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun;
7. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan.

Pagu anggaran untuk program sebagaimana tersebut sebesar Rp. 51,711,953,709.00 terealisasi sebesar Rp. 14.540.511.121 atau 28,12%. Realisasi anggaran program dibawah 50% dikarenakan terdapat perubahan anggaran, namun tidak disertai dengan perubahan perjanjian kinerja. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 97,18% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 28,12% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 345,59%, dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini, telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

#### Sasaran Strategis 6:

#### Meningkatnya Infrastruktur Dasar

Sasaran strategis 6 diukur dengan 4 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 SKPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian, dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **94,99%**.

Tabel 18  
Sasaran Strategis 6

| No        | Indikator                                                         | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|-----------|-------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|           |                                                                   |                |                | Target | Realisasi | % capaian | Target | Realisasi | % capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1         | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                              | 31,33          | 71,90          | 71,98  | 73,10     | 101,56    | 74,50  | 75,91     | 101,89    | 0,33         | 2,81        | 60                   |
| 2         | Persentase Rumah Tangga Pengguna Air Bersih                       | 65,85          | 76,74          | 78,83  | 76,29     | 96,78     | 78,50  | 78,60     | 100,13    | 3,35         | 2,31        | 60                   |
| 3         | Rasio Jaringan Irigasi                                            | 8,92           | 11,98          | 12,43  | 24,67     | 198,47    | 15,50  | 12,55     | 80,97     | -117,50      | -12,12      | 54,53                |
| 4         | Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | 26,85          | 28,10          | 29,65  | 29,57     | 99,73     | 30,50  | 29,57     | 96,95     | -2,78        | 0           | 27,13                |
| Rata-Rata |                                                                   |                |                |        |           |           |        |           | 94,99     |              |             |                      |

**a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**

**1. Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi**

Standar untuk rumah tinggal bersanitasi sekurang-kurangnya rumah tinggal tersebut mempunyai akses untuk layanan sanitasi seperti fasilitas air bersih, pembuangan tinja, pembuangan air limbah dan pembuangan sampah. Indikator Persentase rumah tinggal bersanitasi diukur dengan membandingkan jumlah rumah tinggal yang bersanitasi dengan jumlah rumah tinggal seluruhnya. Sampai dengan tahun 2020, data dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang jumlah rumah tinggal yang terlayani sistem limbah yang memadai sebanyak 31.515 rumah dari jumlah rumah tinggal seluruhnya sebanyak 41.137 rumah (75,91%) jika membandingkan dengan realisasi 2019 (73,10%) maka terdapat peningkatan sebesar 0,33 atau sebanyak 186 rumah tinggal yang bersanitasi. Jika melihat tabel diatas maka untuk pencapaian target indikator ini telah memenuhi target yang ditetapkan, adapun faktor keberhasilan dari pencapaian indikator adalah adanya program DAK SLBM (Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat) dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah. Jika realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (60%), maka realisasi tahun 2020 sudah mencapai target dari jangka menengah tahun 2021, sehingga harus dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait.

**2. Persentase Jumlah Penduduk Yang Berakses Air Bersih**

Indikator Persentase jumlah penduduk yang berakses air bersih diukur dengan membandingkan jumlah penduduk yang menggunakan air bersih dengan jumlah penduduk seluruhnya. Pada tahun 2020 data yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa jumlah jiwa yang berakses air minum yang aman sebanyak 157.576 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 200.491 (78,60%). Jika membandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka ada peningkatan sebesar (2,31%), atau ada penambahan 79 jiwa penduduk yang bisa mengakses air bersih sehingga mencapai 157.576 jiwa dari keseluruhan jumlah penduduk di Kabupaten Halmahera Utara. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah (60%), maka realiasi sampai tahun 2020 sudah memenuhi target dari jangka menengah tahun 2021, maka harus dilakukan revisi atau perubahan target jangka menengah dari dinas terkait. Pencapaian keberhasilan dari indikator didukung program Pamsimas dan Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah sehingga telah memenuhi target yang ditetapkan.

**3. Rasio Jaringan Irigasi**

Jaringan irigasi merupakan satu kesatuan saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air irigasi, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang jaringan irigasi dari luas lahan budidaya pertanian. Luas lahan budidaya pertanian di Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2018 yaitu sebesar 3.459 Ha dan realisasi panjang jaringan irigasi sampai dengan Tahun 2020 sepanjang 43.436 m (24,67 %). Target tahun 2020 2.3 km jaringan irigasi yang dibangun,

karena adanya penyesuaian kondisi lapangan maka yang terealisasi hanya sepanjang 2 km. Jika membandingkan dengan realisasi tahun 2019 maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan sebesar 13%, untuk itu upaya perbaikan untuk mencapai target Pembangunan jangka menengah, maka pada tahun 2021 akan dibangun jaringan irigasi sepanjang 5.2 km di kecamatan kao barat. Jika realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah (54.53 m/ha), maka terdapat selisih sebesar 41,98 m/ha yang belum tercapai.

#### 4. Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air tidak Tersumbat

Drainase merupakan pembuangan massa air secara alami atau buatan dari permukaan atau bawah permukaan dari suatu tempat. Sehingga sistem drainase di suatu kota sangat penting untuk mewujudkan kota yang bersih indah dan sehat. Indikator ini diukur dengan membandingkan panjang drainase dalam kondisi baik dengan jumlah keseluruhan panjang drainase di Kabupaten. Panjang drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat sampai dengan tahun 2020 tidak ada penambahan pembangunan, hal ini disebabkan karena untuk tahun 2020 hanya dilakukan pemeliharaan drainase sepanjang 1.5 km, sehingga panjang drainase sampai tahun 2020 tetap pada angka 36.91 km dari jumlah panjang drainase keseluruhan 124.83 km (29,57%). Jika membandingkan dengan target jangka menengah (27,13%), maka telah memenuhi target yang ditetapkan untuk itu perlu dilakukan perubahan target pada jangka menengah. Jika membandingkan dengan target tahun 2019, maka realisasinya sama dengan realisasi tahun 2020. Untuk itu tahun 2021 akan dilakukan pembangunan drainase melalui Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong.

#### c. Analisis Program dan Pendanaan

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Meningkatnya Infrastruktur Dasar yang didukung dengan program-program sebagai berikut:

Tabel 19  
Program dan Kegiatan Sasaran 6

| No            | Program                                                                                 | Pagu Anggaran<br>(Rp)    | Realisasi Anggaran<br>(Rp) | %             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------|
| 1             | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah                       | 10.366.653.711,82        | 8.906.409.563,00           | 85,91%        |
| 2             | Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong                                      | 1.441.815.000,00         | 1.342.513.000,00           | 93,11%        |
| 3             | Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lain | 4.714.002.000,00         | 3.605.926.640,00           | 76,49%        |
| 4             | Program Kegiatan DAK Pertanian                                                          | 1.822.200.000,00         | 1.171.200.000,00           | 64,27%        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                         | <b>18.344.670.711.82</b> | <b>15.026.049.203,00</b>   | <b>81,91%</b> |

Pagu anggaran untuk program diatas sebesar Rp. 18.344.670.711,82 dan terealisasi sebesar Rp. 15.026.049.203,00 atau persentase sebesar 81,91%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 94,99% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 81.91% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 111,70%. Dengan persentase

tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

#### Sasaran Strategis 7 :

### Meningkatnya Akseibilitas Transportasi dan Informasi

Sasaran strategis 7 diukur dengan 3 Indikator yang terdiri dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh 2 OPD, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan, dengan kategori capaian **Baik Sekali** karena mencapai nilai rata-rata **110,80%**.

Tabel 20  
Sasaran Strategis 7

| No        | Indikator                                          | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|-----------|----------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|           |                                                    |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1.        | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik | 65,66          | 79,76          | 82,75  | 82,59     | 99,81     | 83,25  | 85,49     | 102,69    | 2,88         | 2,90        | 93,82                |
| 2.        | Rasio Ketersediaan Jembatan                        | 80,61          | 77,78          | 77,78  | 77,78     | 100       | 79     | 78,79     | 99,73     | -0,27        | 1,01        | 99,81                |
| 3         | Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas          | 44             | 60             | 0      | 0         | 0         | 50     | 35        | 130       | -            | -           | 30                   |
| Rata-Rata |                                                    |                |                |        |           |           |        |           | 110,80    |              |             |                      |

#### a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran

##### 1. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

Jalan merupakan sarana yang sangat penting dalam pembangunan suatu daerah, dimana jalan membuka daerah-daerah yang terisolir, juga membuka akses jarak tempuh yang lebih dekat dari satu daerah ke daerah lain. Indikator ini diukur dengan membandingkan antara panjang jalan dalam kondisi baik dengan total panjang jalan yang dibangun. Pada Tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang melaksanakan kegiatan pembangunan jalan yang tersebar di beberapa kecamatan sepanjang 8.75 Km.

Dengan adanya pembangunan jalan yang dilakukan, total Panjang Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap fungsional dan memenuhi persyaratan teknis jalan bertambah 8,75 Km menjadi 257.50 Km atau sebesar 85,49 persen dari total Panjang Jalan Kabupaten yang sudah dibangun sampai dengan tahun 2020. Panjang Jalan Kabupaten seluruhnya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati Halmahera Utara nomor 600/210/HU/2018 tanggal 13 Juli 2018 yaitu 301.20 Km. Target pembangunan di bidang jalan tercapai dengan baik, bila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya, persentase capaiannya meningkat. Jika membandingkan

dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, maka dapat dilihat bahwa peningkatan pajang jalan dalam kondisi baik tidak signifikan dimana pada tahun 2017-2018 angka capaiannya sebesar 14,10% sedangkan pada tahun 2018-2020 hanya sebesar 5,73%. Hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran karena pembangunan Jalan Provinsi yang dibangun secara *Multy Years* oleh Kabupaten. Jika realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 (93,82%), maka masih ada selisi 8,33% untuk itu pada tahun 2021 akan dilakukan pembangunan jalan melalui Program Pembangunan Jalan dan Jembatan.

## 2. Rasio Ketersediaan Jembatan.

Jembatan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan infrastruktur disuatu daerah sehingga Ketersediaan jembatan sangat penting sebagai sarana penunjang kelancaran transportasi darat yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah (memperlancar arus perdagangan). Indikator ini dihitung dengan membandingkan jumlah jembatan yang dibangun dalam kondisi baik dengan jumlah jembatan yang harusnya terbangun.

Kebutuhan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara adalah sebanyak 99 buah dengan total panjang 1.265,26 M. Data jembatan menurut kondisi jembatan di kabupaten Halmahera Utara.

Tabel 21  
Data Jembatan Menurut Kondisi Jembatan  
di Kabupaten Halmahera Utara

| No           | Kondisi Jembatan     | Panjang 2019 (M) | Jumlah Buah | Panjang 2020 (M) | Jumlah (Buah) |
|--------------|----------------------|------------------|-------------|------------------|---------------|
| 1            | Baik                 | 853,02           | 77          | 895,02           | 78            |
| 2            | Rusak Ringan         | 53,10            | 2           | 53,10            | 2             |
| 3            | Rusak Berat          | 86,14            | 2           | 86,14            | 2             |
| 4            | Belum Ada Konstruksi | 273,00           | 18          | 231,00           | 17            |
| <b>Total</b> |                      | <b>1.265,26</b>  | <b>99</b>   | <b>1.265,26</b>  | <b>99</b>     |

Pada Tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah melakukan pembangunan 1 buah jembatan di desa Katana Kecamatan Tobelo. Pembangunan jembatan belum dilakukan sehingga masih terdapat 17 buah jembatan yang belum dibangun dari jumlah keseluruhan kebutuhan jembatan di Kabupaten Halmahera Utara. Jika realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target RPJMD, maka masih ada selisih sebesar 21,02% yang harus dicapai pada tahun 2021.

## 3. Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas

Pada Tahun 2020 jumlah kecelakaan yang terjadi sebanyak 35 kasus dari yang ditargetkan 40 kasus kecelakaan. Sebagian besar kasus kecelakaan terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam berkendara dan pengaruh minuman keras. Jika melihat angka kecelakaan lalulintas dari tahun 2016 sampai tahun 2020 maka terdapat penurunan angka dimana pada tahun 2016 sebanyak 60 kasus, tahun 2017 sebanyak 44 kasus, tahun 2018 sebanyak 60 kasus, sedangkan untuk tahun 2019 tidak dapat dibandingkan karena tidak ada data yang disajikan pada tahun 2019. Jika dibandingkan dengan target jangka menengah tahun

2021 (30 kasus), maka belum memenuhi target yang ditetapkan. Adanya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui Dinas Perhubungan dalam menekan jumlah kasus kecelakaan lalu lintas yaitu dengan melakukan pembangunan rambu-rambu lalu lintas di beberapa kecamatan dalam beberapa tahun ke depan dan pengawasan berkala kelengkapan serta kelaikan operasional kendaraan.

#### b. Analisis program dan Pendanaan

Upaya pemerintah daerah di dalam meningkatkan Akseibilitas Transportasi dan Informasi melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan melalui Program:

Tabel 22  
Program dan Kegiatan Sasaran 7

| No            | Program/Kegiatan                                              | Pagu Anggaran (Rp)       | Realisasi Anggaran (Rp)  | %             |
|---------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------|
| 1             | Program pembangunan jalan dan jembatan                        | 77.599.590.538,90        | 72.155.854.927,00        | 92,98%        |
| 2             | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan          | 300.000.000,00           | 99.900.000,00            | 33,30%        |
| 3             | Program pembangunan infrastruktur perdesaan                   | 3.347.502.000,00         | 3.347.502.000,00         | 100,00%       |
| 4             | Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas                | 66.000.000,00            | -                        | 0,00%         |
| 5             | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | 28.400.000,00            | 28.400.000,00            | 100,00%       |
| <b>Jumlah</b> |                                                               | <b>81.341.492.538,90</b> | <b>75.631.656.927,00</b> | <b>92,98%</b> |

Jumlah pagu anggaran untuk program-program sebagaimana tersebut diatas sebesar Rp. 81.341.492.538,90,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 75.631.656.927,00,- atau sebesar 92,98%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara nilai capaian kinerja sebesar 110,80% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 92,98% maka diperoleh nilai efisiensi pencapaian sasaran sebesar 119,17%. Dengan nilai tersebut, dapat dinyatakan proses pencapaian sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

#### Sasaran Strategis 8:

##### Terwujudnya Kesetaraan Gender

Sasaran ini diukur melalui 1 (satu) indikator yang diusung oleh 1 (satu) Perangkat Daerah yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana kategori capaian **Cukup** karena mencapai nilai **57,62%**



Tabel 23  
Sasaran Strategis 8

| No | Indikator                         | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|----|-----------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|    |                                   |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1. | Partisipasi Angka Kerja Perempuan | 27,98          | 44,54          | 33,9   | 42,06     | 124,07    | 73,00  | 42,06     | 57,62     | -66,45       | -           | 46,44                |

**a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**

Jumlah angkatan kerja perempuan baik di pemerintahan maupun swasta adalah 26.249 jiwa, sedangkan jumlah total angkatan kerja perempuan berjumlah 62.412 jiwa sesuai dengan data BPS dan capaian indikator sebesar 42,06% dari target yang ditetapkan pada tahun 2019 sebesar 33,9%. Sedangkan di tahun 2020 jumlah partisipasi angkatan kerja sesuai data BPS baik di Pemerintahan maupun swasta pada Provinsi Maluku Utara adalah 526.803 Jiwa sedangkan Jumlah total Angkatan Kerja Perempuan 62.412 Jiwa di Kabupaten Halmahera Utara, maka diperoleh Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan 11,85%. Target yang ditetapkan pada tahun 2020 adalah 73,00% sedangkan realisasinya 42,06% dengan capaian 57,62%. Perbandingan hasil capaian tahun 2020 dengan tahun 2019 adalah -66,45%. Sedangkan untuk realisasi tahun 2019 dan 2020 adalah sama 42,06% sehingga tidak ada perbandingan realisasi atau capaiannya 0%.

Jika dilihat dari realisasi tahun 2019 dan tahun 2020 tidak terjadi peningkatan/penurunan dalam angka partisipasi angka kerja perempuan di Kabupaten Halmahera Utara walaupun adanya Pandemi COVID-19 banyak pekerja yang diberhentikan atau dirumahkan. Bahkan Badan Pusat Statistik mencatat bahwa di Indonesia tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan meningkat 1,32% ke 53,13%. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mengalami penurunan 0,84% menjadi 82,41%. Ini artinya bahwa walaupun di tengah Pandemi COVID-19 para perempuan tadinya tidak bekerja dan bukan angkatan kerja, sekarang masuk ke dunia kerja. Selain itu Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pengangguran semakin bertambah karena Pandemi COVID-19. Di mana, pengangguran naik 2,67 juta orang menjadi 9,77 juta orang.

**b. Analisis Program dan Pendanaan**

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan kesetaraan gender didukung dengan Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak;
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan;
3. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

Pagu anggaran untuk program tersebut sebesar Rp. 249.767.616 dan terealisasi sebesar Rp. 47.398.000 atau persentase sebesar 18,98%. Perbandingan antara capaian kinerja sebesar 57,62% dengan persentase realisasi anggaran sebesar 18,98%, diperoleh hasil pencapaian sebesar 303,63%



Dengan persentase tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

#### Sasaran Strategis 9:

#### Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pariwisata dan Kehutanan

Sasaran ini diukur dengan 5 indikator yang diusung oleh 3 Perangkat Daerah yaitu, Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan dengan kategori capaian **Cukup** karena mencapai nilai rata-rata **72,07%**.

Tabel 24  
Sasaran Strategis 9

| No        | Indikator                                                                 | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |              | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
|           |                                                                           |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian    | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1         | Kontribusi Sektor Pertanian/ Perkebunan Terhadap PDRB                     | 19,80          | 18,71          | 19,20  | 19,20     | 100       | 20,10  | 12,94     | 64           | -36          | -6,26       | 19,80                |
| 2         | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB                                 | 4,20           | 4,30           | 4,50   | 4,24      | 94,22     | 5      | 3,98      | 80           | -15          | -0,26       | 5,00                 |
| 3         | Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton) | 185,40         | 12,95          | 13,20  | 12,96     | 98,18     | 13,20  | 12,95     | 98,11        | -0,1         | -0,01       | 41,71                |
| 4         | Kunjungan Wisata                                                          | 58.192         | 63.018         | 65.000 | 65.159    | 100,24    | 65.200 | 31.972    | 49,04        | -51,21       | -33,187     | 65.350               |
| 5         | Produksi Perikanan (Ton)                                                  | 19.084         | 27.752         | 28.246 | 33.375    | 118       | 33.750 | 23.364    | 69,23        | -48,93       | -10,011     | 21,00                |
| Rata-Rata |                                                                           |                |                |        |           |           |        |           | <b>72,07</b> |              |             |                      |

#### a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja

##### 1. Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2020 ditargetkan 20,10% dan realisasinya 12,94% dengan persentase capaian sebesar 64%. Jika dibandingkan tahun 2019 ditargetkan 19,20% dan realisasinya sebesar 19,20% atau capaian 100%, maka mengalami penurunan capaian sebesar 36% kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan terhadap PDRB.

Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB Tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2019, Hal ini disebabkan karena terjadi penurunan pada



beberapa komoditas pertanian dan perkebunan seperti Padi, Jagung, Pala yang disebabkan oleh pandemi Covid 19.

## **2. Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB**

Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB tahun 2020 ditargetkan 5% dan realisasinya sebesar 3,98% dengan persentase capaian sebesar 80%. Jika dibandingkan tahun 2019 ditargetkan sebesar 4,50% dan realisasinya sebesar 4,24% dengan persentase capaian sebesar 94,22%, maka mengalami penurunan capaian sebesar 15% .

Diketahui bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kontribusi Sektor Perikanan terhadap PRDB adalah Produksi Perikanan. Produksi Perikanan tangkap di Tahun 2020 adalah sebesar 23.364. Setelah di kaji ternyata kenaikan produksi perikanan belum meningkatkan presentase kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB, karena juga diikuti dengan kenaikan yang lebih tinggi dari sektor lainnya.

## **3. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar (Ton)**

Dari semua bahan komoditi yang menjadi indikator kinerja untuk perhitungan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, hanya 3 (tiga) jenis komoditas yaitu Padi sawah, Padi Ladang, dan Jagung yang dianggarkan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara melalui APBD. Target tahun 2020 sebesar 13,20 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 12,95 Ton/Ha atau presentasi capaian sebesar 98,11%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019, yang ditargetkan sebesar 13,20 Ton/Ha dengan realisasi sebesar 12,96 Ton/Ha atau capaian sebesar 98,18% maka terjadi penurunan capaian sebesar 0,1% dari tahun 2019 akan tetapi belum mencapai target di tahun 2020. Produktivitas Padi dan Jagung yang belum mencapai target karena ada penanaman padi dan Jagung yang dilaksanakan di akhir tahun 2020 dan waktu panennya di awal tahun 2021, sehingga produksinya terhitung di tahun 2021.

## **4. Kunjungan Wisata**

Jumlah Kunjungan Wisatawan pada tahun 2020 ditargetkan 65.200 wisatawan dan terealisasi 31.972 wisatawan dengan persentase capaian sebesar 49,04%. Jika dibandingkan dengan Tahun 2019 yang ditargetkan sebanyak 65.000 wisatawan dan terealisasi sebanyak 65.159 dengan persentase capaian sebesar 100,24% atau mengalami penurunan capaian sebesar 51,21% disebabkan karena pandemi covid 19 dan sarana prasarana yang masih minim.

Ditargetkan Peningkatan kunjungan wisatawan serta pengembangan destinasi pariwisata yang semakin baik dan tetap diupayakan promosi wisata. Jangka menengah Tahun 2021 jumlah kunjungan wisatawan yang datang Ke Halmahera Utara, ditargetkan sebanyak 65.350 wisatawan.

## **5. Produksi Perikanan**

Produksi Perikanan Pada tahun 2020 ditargetkan sebesar 33.750 Ton dan terealisasi sebesar 23.364 Ton atau capaian sebesar 69,23%. Jika dibandingkan dengan Produksi

Perikanan tahun 2019 yang ditargetkan sebesar 28.246 ton dan terealisasi sebesar 33.375 ton atau capaian sebesar 118%, maka mengalami penurunan sebesar 48,93 Ton dari Tahun 2019.

Hasil produksi perikanan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya disebabkan sebagian besar program tidak terlaksanakan maksimal karena adanya pandemi covid 19 dan sumbangan terbesar yaitu dari perikanan tangkap. Khusus perikanan budidaya masih ditargetkan dengan jumlah produksi yang rendah, karena terdapat beberapa kendala yaitu sarana dan prasarana yang belum memadai, masih rendahnya kapasitas aparatur pengelola teknis, kurang tersedianya bahan makanan ikan, dan lingkungan yang kurang sesuai dengan habitat. Oleh karena itu, sebagaimana tahun sebelumnya tetap dilakukan berbagai upaya melalui peningkatan kapasitas dari sumber daya aparatur budidaya perikanan dan peningkatan/perbaikan sarana dan prasarana di bidang budidaya sehingga diharapkan ada peningkatan capaian target dari indikator kinerja produksi perikanan.

Pada jangka menengah tahun 2021 ditargetkan jumlah produksi perikanan sebesar 21.000 ton. Realisasi tahun 2020, sudah melebihi target jangka menengah tahun 2021.

#### **b. Analisis Program dan Pendanaan**

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan, dan Pariwisata didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan;
2. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
3. Program Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan;
4. Program Pengembangan Budidaya Perikanan;
5. Program Pengembangan Perikanan Tangkap;
6. Program Pengembangan Destinasi Wisata;

Total anggaran program-program diatas sebesar Rp. 13.350.390.900 dan terealisasi sebesar Rp. 4.418.486.928 atau persentase sebesar 33,09% dan rata-rata capaian kinerja 72,07%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja rata-rata sebesar 72,07% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 33,09% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 217,80% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

#### **Sasaran Strategis 10:**

##### **Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM**

Sasaran ini diukur melalui 3 (tiga) indikator yang diusung oleh 3 Perangkat Daerah yaitu Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **77,39%**.

**Tabel 25**  
**Sasaran Strategis 10**

| No               | Indikator                                    | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |              | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|--------------|--------------|-------------|----------------------|
|                  |                                              |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian    | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1                | Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA) | 241,00         | 320,00         | 350    | 385       | 110       | 390    | 256       | 65,64        | -44,36       | -129        | 253                  |
| 2                | Pertumbuhan Industri                         | 8,91           | 38,71          | 17     | 20,59     | 121,11    | 18     | 6,79      | 37,72        | -83,39       | 13,8        | 19,00                |
| 3                | Usaha Mikro dan Kecil                        | 96,04          | 99,82          | 97     | 99,82     | 102,90    | 50     | 64,40     | 128,8        | 25,9         | -35,42      | 97,90                |
| <b>Rata-Rata</b> |                                              |                |                |        |           |           |        |           | <b>77,39</b> |              |             |                      |

**a. Deskripsi Sasaran dan Capaian Kinerja Sasaran**

**1. Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)**

Sasaran Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) yang ditargetkan pada tahun 2020 adalah 390 investor, tetapi hanya terealisasi sebanyak 256 investor yang terdiri dari (255 PMDN dan 1 PMA) sehingga selisih antara target dan realisasi sebesar 134 Investor atau capaian kinerja bila dipersentasekan sebesar 65,64%.

Jika disandingkan dengan realisasi pada tahun 2019 sejumlah 385 Investor, maka terdapat penurunan sebanyak 129 Investor, terjadi Penurunan jumlah investor di Kabupaten Halmahera Utara disebabkan karena minimnya penyampaian informasi, edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas teknis terkait mengenai proses berinvestasi dilingkungan masyarakat kabupaten Halmahera Utara maupun diluar masyarakat Kabupaten Halmahera Utara, sehingga berdampak pada berkurangnya minat berinvestasi di kabupaten halmahera utara. Upaya perbaikan kedepan pemerintah daerah pada Dinas teknis terkait akan menganggarkan anggaran untuk program sosialisasi dan edukasi mengenai investasi di Kabupaten Halmahera Utara, walaupun terdapat penurunan akan tetapi realisasi pada tahun 2020 telah melampaui target jangka menengah 2021, untuk itu diusulkan agar melakukan revisi terhadap target RPJMD.

**2. Pertumbuhan Industri**

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi Kabupaten Halmahera Utara. Adapun industri yang berkembang antara lain: Industri Pangan (pengeringan ikan, pengawetan ubur-ubur, minyak goreng, mie kering, roti/kue, penggilingan kopi, es batu/balok, es lilin, tahu tempe, minuman sari buah, pengolahan rumput laut, pembekuan ikan, pengasapan ikan, dan pengawetan ikan), Kimia dan Bahan Bangunan (Penggergajian kayu, sortase rotan, perabot kayu, percetakan/fotocopy, genteng, tela pres dan percetakan kain), Logam/Elektronika (seperti alat pertanian, alat dapur, reparasi bengkel umum, reparasi radio, tv dan tape, reparasi motor laut). Jumlah industri pada Tahun 2020

sebanyak 519 kelompok, jika dibandingkan dengan jumlah industri di tahun 2019 sebanyak 486 kelompok, terjadi penambahan sebanyak 33 kelompok dengan tingkat pertumbuhan industri mencapai 6,79%. walaupun pertumbuhan Industri pada tahun 2020 tidak mencapai target yang diharapkan, dikarenakan adanya wabah pandemik Covid-19 yang mempengaruhi pertumbuhan industri baik di tingkat Daerah maupun pertumbuhan Industri secara global.

### **3. Usaha Mikro dan Usaha Kecil**

Usaha mikro dan usaha kecil dapat memberi peluang kepada masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi. Untuk mengembangkan usaha mikro dan usaha kecil dibutuhkan investasi yang relatif kecil sehingga terjangkau oleh masyarakat ekonomi menengah ke bawah. Untuk itu pemerintah daerah berupaya menciptakan iklim usaha yang kondusif. Pada tahun 2020 usaha mikro dan usaha kecil yang berkembang di Kabupaten Halmahera Utara sebanyak 2.615 dari 4.060 jumlah seluruh Usaha Kecil Menengah (UKM) apabila dipersentasekan sebesar 64,40 %. Realisasi indikator usaha mikro dan usaha kecil pada tahun 2020 melebihi target yang ditentukan, apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 terjadi penurunan selisih sebesar 35,42%, salah satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan Usaha Mikro dan Usaha Kecil pada tahun 2020 yakni munculnya Pandemi Covid-19 yang melanda Kabupaten Halmahera Utara.

#### **b. Analisis Program dan Pendanaan**

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran meningkatnya aksesibilitas permodalan, pemasaran dan teknologi serta promosi produk UMKM didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi;
2. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi;
3. Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri;
4. Program Pengembangan sistem pendukung Usaha bagi Usaha mikro kecil menengah (UKM);
5. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah.

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sejumlah Rp. 2.494.515.391 dan terealisasi sebesar Rp. 782.479.000 atau 31,37%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 77,39% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 31,37% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 246,72% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

**Sasaran Strategis 11:****Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang**

Sasaran ini diukur melalui 2 (dua) indikator yang diusung oleh 2 Perangkat Daerah, yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup dengan kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **94,41%**.

Tabel 26  
Sasaran Strategis 11

| No        | Indikator                                  | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|-----------|--------------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|           |                                            |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1.        | Rasio Bangunan ber-IMB Per Satuan Bangunan | 0,046          | 0,04           | 0,05   | 0,05      | 100       | 0,06   | 0,05      | 83,33     | -16,67       | 0           | 0,50                 |
| 2.        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)    | 0,00           | 0,00           | 79,80  | 0,00      | 0,00      | 79,50  | 83,86     | 105,48    | 105,48       | 83,86       | 82,9                 |
| Rata-Rata |                                            |                |                |        |           |           |        |           | 94,41     |              |             |                      |

**a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran****1. Ratio Bangunan ber-IMB Per Satuan bangunan**

Izin mendirikan Bangunan (IMB) merupakan perizinan yang diberikan kepala daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku. IMB akan melegalkan suatu bangunan yang direncanakan sesuai dengan tata ruang yang telah ditentukan. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah bangunan yang memiliki izin mendirikan bangunan (IMB) dengan jumlah bangunan wajib IMB yang ada di Halmahera Utara.

Tabel 24  
Ratio Bangunan ber IMB per Satuan Bangunan Tahun 2020

| No | Uraian                  | Tahun       |             |             |
|----|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
|    |                         | 2018        | 2019        | 2020        |
| 1  | Jumlah Bangunan         | 52.287 Unit | 53.189 Unit | 56.067 Unit |
| 2  | Jumlah Bangunan ber IMB | 2.239 Unit  | 2.681 Unit  | 2.793 Unit  |
| 3  | Ratio Bangunan ber IMB  | 0,04        | 0,05        | 0,05        |

Pada Tahun 2020 terjadi penambahan bangunan ber-IMB dari 2.681 unit di Tahun 2019 menjadi 2.793 unit, yang berarti terdapat penambahan 112 unit bangunan. Penambahan bangunan ber-IMB pada Tahun 2020 juga dibarengi dengan penambahan bangunan baru dari 53.189 Unit menjadi 56.067 Unit, yang berarti terdapat penambahan bangunan baru sebanyak 2.878 unit. Setelah dilakukan perhitungan ratio bangunan ber-IMB, realisasi indikatornya



sebesar 0,05% dari target 0,06%. Hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2020 indikator rasio bangunan ber-IMB tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi kepada masing-masing wajib IMB untuk melaksanakan pengurusan administrasi IMB. Untuk upaya perbaikan kedepan dengan kegiatan sosialisasi kepada masing-masing wajib IMB untuk melaksanakan pengurusan administrasi, sehingga target tersebut dapat dicapai.

Jika realisasi tahun 2020 dibandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 sebesar 0,50%, maka realisasi rasio bangunan ber-IMB masih lebih kecil dari target Jangka menengah tahun 2021.

## **2. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Tujuan disusunnya IKLH adalah untuk memberikan informasi kepada pengambil keputusan di daerah tentang kondisi lingkungan di daerah sebagai bahan evaluasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, selain itu juga IKLH merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada publik tentang pencapaian target program-program pemerintah daerah di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Indikator yang digunakan dalam perhitungan IKLH adalah Indeks Kualitas/Pencemaran air (IKA), Indeks Kualitas/Pencemaran Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), dengan formulasi perhitungan IKLH Kabupaten Halmahera Utara =  $(30\% \times IKA) + (30\% \times IKU) + (40\% \times IKTL)$ .

Indeks IKLH di Tahun 2020 ditargetkan 79,50% dengan realisasi sebesar 83,86% dan capaian sebesar 105,48%, karena pada tahun 2020 Dinas Lingkungan Hidup telah menganggarkan program untuk menjawab Indeks IKLH. Bila realisasi Indeks IKLH tahun 2020 disandingkan dengan target jangka menengah tahun 2021 sebesar 82,9%, maka realisasinya sudah melampaui target jangka menengah yang ditetapkan, sehingga diharapkan agar dapat diusulkan revisi target RPJMD mendatang.

### **b. Analisis Program dan Pendanaan**

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan sasaran Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang, didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah;
2. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi;
3. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
4. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
5. Program rehabilitasi hutan dan lahan;
6. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam;
7. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam;
8. Program peningkatan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup;



9. Program pengendalian kebakaran hutan;
10. Program Penanaman Pohon Pada Lahan di Luar Kawasan;
11. Program Pada Kanan Kiri Sungai, Sempadan Danau dan daerah Tangkapan Air (DTA) Sekitar Mata Air dan daerah Imbuhan Air Tanah.

Pagu anggaran untuk program tersebut diatas sebesar Rp. 29.394.539.600 dan terealisasi sebesar Rp. 4.306.071.280 atau 14,65%. Nilai efisiensi capaian ini dilakukan dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 94,41% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 14,65% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 644,47% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan **Sangat Efisien**.

#### Sasaran Strategis 12:

##### Menurunnya Angka Kemiskinan

Sasaran ini diukur melalui 5 (lima) indikator yang diusung oleh 2 (dua) Perangkat Daerah, yaitu Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi namun 1 (satu) indikator tidak diukur karena tidak tersedia data. Dari 5 (lima) indikator yang diukur diperoleh kategori capaian **Baik** karena mencapai nilai rata-rata **82,80%**.

Tabel 28  
Sasaran Strategis 12

| No        | Indikator                          | Realisasi 2017 | Realisasi 2018 | 2019   |           |           | 2020   |           |           | Perbandingan |             | Jangka Menengah 2021 |
|-----------|------------------------------------|----------------|----------------|--------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|--------------|-------------|----------------------|
|           |                                    |                |                | Target | Realisasi | % Capaian | Target | Realisasi | % Capaian | % Capaian    | % Realisasi |                      |
| 1.        | Angka Kemiskinan                   | 4,00           | 4,51           | 4,01   | 4,61      | 85,04     | 3,91   | 4,45      | 86,19     | 1,15         | -0,16       | 3,91                 |
| 2.        | Rasio Ketergantungan               | 42,80          | 44,38          | 43,1   | 48,36     | 87,80     | 43,10  | 42,78     | 100,74    | 12,94        | -5,58       | 43,00                |
| 3.        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 63,00          | 68,71          | 68,75  | 83,88     | 122,01    | 84,50  | 47,53     | 56,25     | 65,76        | -36,35      | 75,00                |
| 4         | Indeks Gini                        | 0,23           | 0,33           | 0,30   | 0,24      | 80,00     | 0,25   | 0,28      | 88,00     | 8,00         | 0,04        | 0,25                 |
| 5         | Laju Inflasi                       | -              | -              | -      | -         | -         | 3,51   | -         | -         | -            | -           | -                    |
| Rata-Rata |                                    |                |                |        |           |           |        |           | 82,80     |              |             |                      |

#### a. Deskripsi sasaran dan capaian kinerja sasaran

##### 1. Angka Kemiskinan

Kemiskinan merupakan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (*basic needs approach*). Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawa garis kemiskinan. Dengan demikian Angka Kemiskinan dapat diartikan persentase jumlah penduduk miskin pada suatu wilayah tertentu.

Garis kemiskinan Kabupaten Halmahera Utara pada Tahun 2020 adalah Rp. 248.544 per kapita per bulan, dengan jumlah penduduk miskin berjumlah 8.750 jiwa atau 4,45% dari 197.638 jiwa penduduk Kabupaten Halmahera Utara (*Sumber BPS Kab. Halmahera Utara*) atau 4.36% dari 200.491 jiwa penduduk (*Sumber data Capil Kabupaten Halmahera Utara*). Target pada Perjanjian Kinerja tahun 2020 yaitu 3,91%, maka capaian kinerjanya sebesar 86.19%. Jika, dibandingkan dengan capaian realisasi kinerja pada tahun 2019 mengalami penurunan sebesar -0.16% namun tidak mencapai target di tahun 2020, hal ini dipengaruhi oleh laju inflasi maupun refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19. Dalam rangka menekan laju pertumbuhan angka kemiskinan di Kabupaten Halmahera Utara kedepannya, upaya dilakukan Pemerintah Daerah melalui program-program pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran, menstabilkan harga bahan makanan pokok, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan.

## **2. Rasio Ketergantungan**

Rasio Ketergantungan atau beban ketergantungan (*dependency ratio*) merupakan angka menunjukan besarnya penduduk golongan umur produktif yang dapat menghasilkan barang atau jasa ekonomi bagi golongan umur muda dan umur tua (golongan umur tidak produktif).

Pada Tahun 2020 jumlah masyarakat Kabupaten Halmahera Utara dikategori umur tidak produktif terdiri dari kelompok umur 0-14 tahun dan kelompok umur 65 tahun ke atas berjumlah 60.071 jiwa, sedangkan kelompok umur dalam kategori produktif atau kelompok umur 15-64 tahun berjumlah 140.420 jiwa (*Sumber; Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Halmahera Utara*). Dengan demikian Rasio Ketergantungan Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020 mencapai 42,78%. Bila, dibandingkan Rasio Ketergantungan di Tahun 2019 yaitu 48,36% mengalami penurunan -5,58% di tahun 2020. Sedangkan Ratio Ketergantungan tingkat nasional mencapai 15,54% (*Sumber Bapenas*), ini artinya angka kelahiran atau pertumbuhan penduduk Kabupaten Halmahera Utara lebih tinggi dibanding nasional. Upaya atau solusi yang dilakukan dalam menurunkan angka beban golongan umur belum produktif dan tidak produktif melalui pelayanan dan perlindungan bagi lanjut usia terlantar, peningkatan sarana dan prasarana panti asuhan/jompo dan mengoptimal penekanan angka laju pertumbuhan penduduk melalui program Keluarga Berencana.

## **3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) didefinisikan sebagai perbandingan antara angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengukur besarnya partisipasi angkatan kerja dalam dunia kerja.

Kabupaten Halmahera Utara Pada Tahun 2020 jumlah Penduduk angkatan kerja sebanyak 66.742 jiwa dan jumlah penduduk usia kerja (15-64 tahun) sebesar 140.420 jiwa. Maka, dapat diperoleh tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 47,53% penduduk Kabupaten Halmahera Utara yang berusia 15 tahun ke atas aktif dalam usaha ekonomi sedangkan 52,47% pada kategori sekolah, ibu rumah tangga, mencari kerja atau pengangguran (*Sumber Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi*). Jika, dibandingkan tahun 2019 angka ini mengalami penurunan

sebesar -36,35%. Sedangkan Tingkat Angkatan Kerja Provinsi Maluku Utara pada Agustus 2020 mencapai 64,28% (Sumber *www.bps.go.id*) hal ini menunjukkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Halmahera Utara masih rendah dari Provinsi. Menurunnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Halmahera Utara di Pengaruhi oleh bebrapa hal yaitu: selama periode Januari-Desember tedapat 12 perusahaan yang melakukan pengurangan tenaga kerja; jumlah penawaran tenaga kerja lebih besar dari permintaan tenaga kerja; kurangnya tenaga kerja terdidik atau terlatih sehingga rendahnya daya saing; terjadi peningkatan jumlah usia kerja akibat dari meningkatnya pertambahan penduduk. Dalam rangka menekan angka pengangguran dan memberikan kesempatan kerja masyarakat, maka upaya dilakukan melalui instansi terkait melalui pemberian bantuan sarana usaha pada kelompok usaha Perbengkelan, pertukangan, pedagang, salon dan *home industry* serta memberikan pelatihan kerja baik pelatihan kuliner, dan sertifikasi bagi tenaga keamanan di swasta dan instansi pemerintah.

#### **4. Indeks Gini**

Indeks Gini atau Koefisien Gini merupakan satu ukuran umum untuk didistribusi pendapatan atau ukuran umum untuk distribusi pendapatan atau kekayaan yang menunjukkan seberapa merta pendapatan dan kekayaan didistribusikan di antara populasi.

Indeks Gini Kabupaten Halmahera utara Pada Tahun 2020 tercatat 0,28 mengalami peningkatan dengan Indeks Gini pada Tahun 2019. Hal ini berarti distribusi pendapatan penduduk Kabupaten Halmahera Utara lebih merata pada tahun 2019 dibanding tahun 2020 atau dapat dikatakan ketimpangan pendapatannya lebih tinggi di tahun 2020 dibanding tahun 2019 (sumber BPS Kabupaten Halmahera Utara). Berdasarkan level Indeks Gini (kategori ketimpangan rendah ( $0 < 0,35$ ), sedang ( $0,35 - 0,5$ ) atau tinggi ( $> 0,5$ )) Indeks Gini Kabupaten Halmahera Utara termasuk dalam kategori Ketimpangan Rendah. Meningkatnya Indeks Gini tahun 2020 disebabkan oleh adanya Covid-19 yang mempengaruhi pendapatan masyarakat Kabupaten Halmahera Utara.

#### **b. Analisis Program dan Pendanaan**

Upaya dan strategi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mewujudkan menurunnya angka kemiskinan yang didukung dengan program-program sebagai berikut:

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
2. Program Pelayanan dan Rehabilitas Kesejahteraan Sosial;
3. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma;
4. Program Pembinaan panti asuhan/ panti jompo;
5. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial;
6. Program peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja;
7. Program Peningkatan Kesempatan Kerja;
8. Program perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenaga Kerjaan;
9. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi.



Dengan jumlah dana penunjang sebesar Rp. 3.002.928.879 dengan realisasi Rp. 1.754.643.653 atau 58,43%. Nilai efisiensi diukur dengan membandingkan antara capaian kinerja sebesar 82,80% dengan presentase realisasi anggaran sebesar 58,43% diperoleh nilai efisiensi pencapaian sebesar 141,71% dengan nilai tersebut dapat dinyatakan proses pencapaian kinerja sasaran ini telah dilaksanakan dengan ***Sangat Efisien***.

### 3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 02 tahun 2020 tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah perubahan (APBD-P) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020, bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dengan rincian sebagai berikut:

| No | Uraian                        | Anggaran             |                      | Realisasi          | %      |
|----|-------------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|--------|
|    |                               | Sebelum Perubahan    | Setelah Perubahan    |                    |        |
| 1. | Pendapatan                    | 1.171.721.055.955,85 | 1.123.371.089.126,24 | 987.442.269.574,16 | 87,90  |
| 2. | Belanja                       | 1.205.883.729.880,57 | 1.144.724.576.743,85 | 983.721.689.568,48 | 85,94  |
| 3. | Pembiayaan                    |                      |                      |                    |        |
|    | Penerimaan Pembiayaan Daerah  | 40.162.673.924,72    | 53.153.487.617,61    | 49.220.977.450,46  | 92,60  |
|    | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 6.000.000.000,00     | 31.800.000.000,00    | 38.870.336.900,00  | 122,23 |

Tahun 2020 jumlah anggaran yang diperjanjikan untuk dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara adalah sebesar Rp. 360.613.994.934,72, dan terealisasi sebesar Rp. 234.425.281.085,23 atau persentase sebesar 65,00%. Dibandingkan dengan realisasi anggaran tahun 2020 sebesar Rp. 983.721.689.568,48 maka penggunaan anggaran untuk pencapaian kinerja Kabupaten Halmahera Utara sebesar Rp. 234.425.281.085,23 atau persentase sebesar 23,83% Anggaran yang terealisasi tahun 2020 tersebut, digunakan untuk membiayai 12 (dua belas) sasaran dan 80 (delapan puluh) program yang dikelola oleh 48 Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara. Alokasi anggaran per program untuk Tahun 2020, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 29

Alokasi Anggaran Berdasarkan Sasaran dan Penyerapan Anggaran Per Sasaran Tahun 2020

| No | Sasaran                                                 | Jumlah  | Alokasi            | Realisasi          | Perangkat Daerah                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------|---------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                         | Program | (Rp)               | (Rp)               |                                                                                  |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih | 5       | 16.759.248.886,00  | 12.272.525.494,00  | Seluruh Perangkat Daerah                                                         |
| 2  | Meningkatnya Penegakan Hukum                            | 6       | 1.755.565.540,00   | 1.152.327.334,00   | Dinas Satpol PP dan Badan Kesbangpol                                             |
| 3  | Terwujudnya Penanganan Bencana                          | 1       | 1.048.290.000,00   | 678.442.000,00     | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                              |
| 4  | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat                | 18      | 151.366.036.163,00 | 103.814.490.145,23 | Dinas Kesehatan, RSUD dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB |

| No            | Sasaran                                                                                                                                          | Jumlah    | Alokasi                   | Realisasi                 | Perangkat Daerah                                                                                                         |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                  | Program   | (Rp)                      | (Rp)                      |                                                                                                                          |
| 5             | Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan                                                                                                        | 7         | 51.711.953.709,00         | 14.540.511.121,00         | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan                                                        |
| 6             | Meningkatnya Infrastruktur Dasar                                                                                                                 | 4         | 18.344.670.711,82         | 15.026.049.203,00         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Pertanian                                                              |
| 7             | Meningkatnya Akseibilitas Transportasi                                                                                                           | 5         | 81.341.492.538,90         | 75.631.656.927,00         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang serta Dinas Perhubungan                                                          |
| 8             | Terwujudnya Kesenjangan Gender                                                                                                                   | 3         | 249.767.616,00            | 47.398.000,00             | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana                                                   |
| 9             | Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan | 6         | 13.350.390.900,00         | 4.418.486.928,00          | Dinas Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan dan Kelautan                                                          |
| 10            | Meningkatnya Akseibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM                                                           | 5         | 2.494.515.391,00          | 782.479.000,00            | Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan Dinas Koperasi dan UMKM |
| 11            | Tersedianya Pengendalian, Pemanfaatan Dan Penataan Ruang                                                                                         | 11        | 29.394.539.600,00         | 4.306.071.280,00          | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Dinas Lingkungan Hidup                                 |
| 12            | Menurunnya Angka Kemiskinan                                                                                                                      | 9         | 3.002.928.879,00          | 1.754.643.653,00          | Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi                                                                        |
| <b>Jumlah</b> |                                                                                                                                                  | <b>80</b> | <b>370.819.399.934,72</b> | <b>234.425.081.085,23</b> |                                                                                                                          |

## BAB IV PENUTUP



Sebagai penutup dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran-sasaran strategisnya. Hasil analisis pencapaian indikator sasaran terhadap 12 (dua belas) sasaran dengan 38 (tiga puluh delapan) indikator kinerja, tergambar pada tabel hasil analisa capaian kinerja sasaran tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 30  
Hasil Analisa Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2020

| No     | Kategori         | Sasaran        | Persentase |
|--------|------------------|----------------|------------|
| 1      | Baik Sekali (BS) | 1,2,3,7        | 33,33      |
| 2      | Baik (B)         | 4,5,6,10,11,12 | 50,00      |
| 3      | Cukup (C)        | 8,9            | 16,67      |
| 4      | Kurang (K)       | -              | -          |
| Jumlah |                  | 12             | 100        |

Dari hasil analisis capaian kinerja sasaran dapat dilihat dari 12 sasaran dengan pembagian sasaran adalah **3** sasaran dinyatakan **Baik Sekali (BS)**, **6** sasaran dinyatakan **Baik (B)** dan **2** sasaran dinyatakan **Cukup (C)**.

Langkah strategis yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk mengatasi masalah-masalah ini adalah:

- Peningkatan kemampuan sumberdaya aparatur;
- Menciptakan sistem pengelolaan data yang baik; dan
- Menciptakan sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi dan pelaporan.

Akhirnya secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 khususnya Tahun Anggaran 2020, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milik Tuhan Yang Maha Esa, namun demikian segala kekurangan dan ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik lagi di esok hari.







# LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



## BUPATI HALMAHERA UTARA PROVINSI MALUKU UTARA

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparansi dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Ir. Frans Manery**  
Jabatan : Bupati Halmahera Utara

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tobelo, 15 Februari 2021

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

**IR. FRANS MANERY**

# LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA



## Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021

| NO | SASARAN                                                 | INDIKATOR                                                         | SATUAN      | TARGET |
|----|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
| 1  | 2                                                       | 3                                                                 | 4           | 5      |
| 1  | Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Yang Baik Dan Bersih | Opini BPK                                                         | -           | WTP    |
|    |                                                         | Nilai Sakip Pemerintah Daerah                                     | -           | B      |
|    |                                                         | Indeks Kepuasan Masyarakat                                        | %           | 84     |
|    |                                                         | Persentase PD yang Menggunakan Aplikasi Berbasis IT               | %           | 65     |
| 2  | Meningkatnya Penegakan Hukum                            | Angka Kriminalitas                                                | /10.000     | 7      |
| 3  | Terwujudnya Penanganan Bencana                          | Persentase Kejadian Bencana Yang di Tangani Kurang dari 24 Jam    | %           | 100    |
| 4  | Terwujudnya Derajat Kesehatan Masyarakat                | Angka Kematian Bayi                                               | /1.000 KH   | 6      |
|    |                                                         | Angka Kematian Ibu                                                | /100.000 KH | 100    |
|    |                                                         | Persentase Balita Kurang Gizi                                     | %           | 4      |
|    |                                                         | Usia Harapan Hidup                                                | Tahun       | 70,8   |
|    |                                                         | Indeks Pembangunan Manusia                                        | %           | 71     |
| 5  | Terwujudnya Akses dan Kualitas Pendidikan               | Angka Melek Huruf                                                 | %           | 99,75  |
|    |                                                         | Angka Rata-Rata Lama Sekolah                                      | %           | 9      |
|    |                                                         | Angka Melanjutkan Sekolah : SD/MI ke SMP/MTs                      | %           | 100    |
|    |                                                         | Rasio Ketersediaan Sekolah Perpenduduk Usia Sekolah               | %           | 80     |
| 6  | Meningkatnya Infrastruktur Dasar                        | Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi                              | %           | 77     |
|    |                                                         | Persentase jumlah Penduduk yang Mendapatkan Akses Air Bersih      | %           | 79     |
|    |                                                         | Rasio Jaringan Irigasi                                            | M/HA        | 15,5   |
|    |                                                         | Drainase Dalam Kondisi Baik/Pembuangan Aliran Air Tidak Tersumbat | KM          | 31,5   |
| 7  | Meningkatnya Akseibilitas Transportasi                  | Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik                | %           | 87     |
|    |                                                         | Rasio Ketersediaan Jembatan                                       | %           | 80     |
|    |                                                         | Menurunnya Tingkat Kecelakaan Lalu Lintas                         | Kasus       | 30     |
| 8  | Terwujudnya Kesetaraan Gender                           | Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan                              | %           | 46,44  |



| NO | SASARAN                                                                                                                                          | INDIKATOR                                            | SATUAN    | TARGET |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 1  | 2                                                                                                                                                | 3                                                    | 4         | 5      |
| 9  | Terwujudnya Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Pemanfaatan Potensi Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Pertambangan, Pariwisata dan Kehutanan | Kontribusi Sektor Pertanian/Perkebunan Terhadap PDRB | %         | 15     |
|    |                                                                                                                                                  | Kontribusi Sektor Perikanan Terhadap PDRB            | %         | 5      |
|    |                                                                                                                                                  | Produktifitas Padi dan Jagung (Ton)                  | Ton/HA    | 15     |
|    |                                                                                                                                                  | Kunjungan Wisata                                     | Wisatawan | 40.000 |
|    |                                                                                                                                                  | Produksi Perikanan (Ton)                             | Ton       | 24.000 |
| 10 | Meningkatnya Aksesibilitas Permodalan Pemasaran dan Teknologi Serta Promosi Produk UMKM                                                          | Jumlah Infestor Berskala Nasional (PMDN/PMA)         | Investor  | 300    |
|    |                                                                                                                                                  | Pertumbuhan Industri                                 | %         | 10     |
|    |                                                                                                                                                  | Usaha Mikro dan Kecil                                | %         | 75     |
| 11 | Tersedianya Pengendalian, Pemanfatan Dan Penataan Ruang                                                                                          | Rasio Bangunan Ber-IMB Per Satuan Bangunan           | Bangunan  | 0,06   |
|    |                                                                                                                                                  | Indek Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)               | %         | 85     |
| 12 | Menurunnya Angka Kemiskinan                                                                                                                      | Angka Kemiskinan                                     | %         | 3,91   |
|    |                                                                                                                                                  | Rasio Ketergantungan                                 | %         | 40     |
|    |                                                                                                                                                  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja                   | %         | 50     |
|    |                                                                                                                                                  | Indeks Gini                                          | -         | 0,25   |
|    |                                                                                                                                                  | Laju Inflasi                                         | -         | 3,21   |

Tobelo, 15 Februari 2021

**BUPATI HALMAHERA UTARA,**

**IR. FRANS MANERY**



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**INSPEKTORAT**  
Jl. Kawasan Pemerintahan 1.a  
**TOBELO**

Kode Pos. 97762

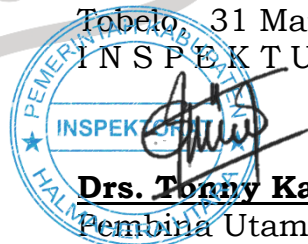
**PERNYATAAN TELAH DIREVIU**  
**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara untuk tahun anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Tobelo, 31 Maret 2021  
INSPEKTUR



**Drs. Tonny Kappuw**  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 197208171992031011

**CHECKLIST REVIU**  
**LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**KABUPATEN HALMAHERA UTARA**  
**TAHUN 2020**

| No | Pernyataan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Check list                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I  | Format <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP</li> <li>2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja</li> <li>3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai</li> <li>4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan</li> <li>5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan</li> <li>6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                    | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/>                      |
| II | Mekanisme penyusunan <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu</li> <li>2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai</li> <li>3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj</li> <li>4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja</li> <li>5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya</li> <li>6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait</li> <li>7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya.</li> </ol> | <input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> X<br><input checked="" type="checkbox"/><br><input checked="" type="checkbox"/><br><input type="checkbox"/> X<br><input checked="" type="checkbox"/> |

|     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| III | Substansi | 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja<br>2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis<br>3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input type="checkbox"/>                                                                                                  |
|     |           | 4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja<br>5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama<br>6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai<br>7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat<br>8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran<br>9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai<br>10. IKU dan IK telah SMART | <input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/><br><br><input checked="" type="checkbox"/> |

**Keterangan :** √ = Ya  
X = Tidak

Hal-Hal yang menjadi perhatian atas Catatan Hasil Reviu (CHR) LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2020 sebagai berikut :

1. Belum ditetapkan mekanisme penyampaian data kinerja dari unit kerja ke Penyusun LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara, namun pengumpulan data dilakukan melalui surat SEKDA nomor 060/026, tanggal 14 Januari 2021, perihal permintaan data;
2. Dari 37 indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK Bupati Halmahera Utara Tahun 2020 yang telah disajikan dalam LKj Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2020, terdapat 16 indikator kinerja telah menyajikan upaya perbaikan ke depan sedangkan 21 indikator kinerja belum menyajikan upaya perbaikan kedepan;

Dari 38 Indikator kinerja yang diperjanjikan dalam PK Bupati Halmahera Utara Tahun 2020, terdapat 1 indikator kinerja yang tidak disajikan data capaian kinerja yaitu indikator Laju inflasi dari sasaran kinerja Angka Kemiskinan.